

Implementasi Good Governance dalam Struktur dan Kultur Lokal oleh Muhammad Fadhli,S.Sos.,M.Si

I. IMPLEMENTASI KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

A. Konsep Good Governance

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai sebuah konsep sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, namun pada tataran realitas khususnya di Indonesia hal ini merupakan barang baru yang langka dan mungkin hanya sebagai sebuah utopia. Konsep governance didefinisikan sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya. (Pinto dalam Nisjar, 1997). Secara sederhana *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, sedangkan World Bank mendefinisikannya sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002). *Good Governance* dapat diartikan pula sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*) (UNDP dalam AKIP LAN, 2001). Dalam *Good Governance* terdapat empat unsur, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) (Bhatta dalam Widodo, 2001).

Good Governance mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (LAN dalam Widodo, 2001). Pengertian pertama mengandung aspek politik dalam rangka demokratisasi dalam pencapaian tujuan

nasional, sedangkan pengertian kedua mengandung aspek *administrative* dari fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional yang efektif dan efisien.

Ditinjau dari aspek pemerintahan (*government*), *Good Governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek :

1. Hukum/kebijakan. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Administrative competence and transparency. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrative, keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi didalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi makro (LAN dalam AKIP, 2001).

B. Good Governance

Jika prasyarat desentralisasi sudah bisa dipenuhi seperti itu, maka cukup bisa dipastikan akan diperoleh hasil bahwa daerah dan pemerintah pusat berbesar hati untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga masalah yang kemudian harus diagendakan penanganannya oleh daerah adalah tentang pelaksanaan good governance (penyelenggaraan negara yang baik), khususnya dalam pengelolaan SDA yang menjadi aset andalan pembangunan daerah. Belajar dari bad governance (penyelenggaraan negara yang buruk) di masa lalu yang telah menyebabkan porak-porandanya sistem ekonomi, sosial-bodaya dan sistem ekologi, kita sepakat bahwa di masa depan pengelolaan SDA dan pembangunan daerah haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersifat good and clean governance (baik dan bersih). Menggunakan prinsip good governance, titik tekannya (emphasize) mesti mengandung kesadaran sustainable (berkelanjutan). Di manapun, pembangunan dengan kaidah good and clean governance itu ditujukan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan

kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan respon atas berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang memacu pertumbuhan dan tidak menginterasikan aspek lingkungan dalam kebijakannya.¹⁶ Prinsip-prinsip good and clean governance yang banyak diperbincangkan saat ini adalah:

1. Lembaga perwakilan (DPRD) yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyaluran aspirasi masyarakat
2. Sistem peradilan yang fair, mandiri dan profesional
3. Birokrasi yang profesional, responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat; dan tatanan masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol terhadap negara. Intinya, good and clean governance yang juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekosistem dalam sistemnya tersebut akan berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah. Maka, refleksi kita bersama adalah bagaimana menanamkan komitmen yang kuat untuk bisa berperan maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen mewujudkan good and clean governance, bukan hanya sebagai retorika tapi menjadi paradigma sistem negara. Good governance merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini banyak diperkenalkan sebagai upaya merumuskan pemerintahan yang baik. Di era otonomi daerah seperti ini, kita melihat tampaknya ada tempat khusus bagi perbaikan kinerja pemerintahan yang ada, terutama pemerintah lokal, di mana nanti diharapkan akan mendukung proses demokrasi ke arah yang sesungguhnya.

Seperti ditunjukkan oleh Meuthia-Ganie Rachman (2000), bahwa good governance mempunyai indikator-indikator yang dimaksudkan sebagai:

1. Penjamin situasi keterbukaan (transparancy)
2. Pertanggungjawaban publik (public accountability) dan,
3. Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik

Konsep ini sendiri sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh berbagai badan internasional. Secara umum, konsep good governance mengundang keterlibatan masyarakat sebagai pendorong pemerintah (jalur struktur) untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan, bukan hanya obyek yang bisa diatur ke mana arah kebijakan dirumuskan. Memang, bahwa konsep good governance (yang dirumuskan oleh negara-negara maju-kapitalis itu) tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Konsep ini sendiri harus dipadankan dengan situasi di Indonesia agar jalan menuju terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan semakin lempang. Untuk bisa sampai pada apa yang dicita-citakan sebagai “pemerintahan yang baik”, nyaris semua aspek yang terlibat dalam pembangunan Indonesia harus dilibatkan. Aktivis parpol, Ornop, LSM, pemerintah, politisi, pengusaha, agamawan, dan masyarakat secara luas mesti memahami arah dan tujuan pencapaian pembangunan Indonesia. Hal ini mutlak diperlukan, sebab akan menjadi sangat ironis jika antarelemen bangsa justru tidak padu. Bahkan tidak hanya tidak padu, melainkan sulit dimengerti dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat, jalan-jalan yang tidak sehat tetap digunakan. Ironisnya lagi, itu dianggap sebagai sah sebab mereka mengatas namakan “pembawa aspirasi demokrasi”. Urgensi sesegera mungkin membahas konsep good governance bagi pemerintahan (terutama lokal) di Indonesia sulit ditolak. Salah satu urgensi itu adalah bagi pembentukan masyarakat sipil yang bertanggung jawab di satu sisi, dan penciptaan pemerintahan yang baik di lain pihak. Sehingga problematikanya, mana yang lebih dulu diciptakan? Good governance atau civil society? Sekiranya pertanyaan ini bukanlah merupakan pertanyaan pilihan, di mana kita harus memilih salah satunya. Keduanya adalah satu: Satu komponen dalam pengembangan masyarakat bangsa secara adil. Memilih salah satunya untuk didahulukan pada akhirnya juga akan menegasikan yang lain. Orde Baru adalah contoh yang baik untuk kita bisa mengerti bahwa rezim pada saat itu memilih salah satunya. Mereka berusaha terlebih dahulu untuk menciptakan “pemerintahan yang baik” di satu sisi, yang lantas mengabaikan “keberdayaan masyarakat” di lain pihak. Dari sini bisa kita mengerti bahwa upaya keras untuk menciptakan demokrasi harus didukung oleh kedua jalur itu; tidak hanya satu. Satu jalur berkeinginan keras untuk menciptakan demokrasi, sementara di sisi lain terlihat enggan untuk berpartisipasi dalam meraih demokrasi, di samping fatal, hal ini tentunya akan senjang dan timpang. Inilah yang jarang kita sadari. Sering kita terjebak pada fatamorgana bahwa

demokrasi hanya akan bisa terwujud melalui aksi massa rakyat pada pemerintah yang korup.

C. Good Corporate Governance

Pada bab yang lalu telah disinggung pentingnya peran masyarakat dan dunia usaha disamping Pemerintah dalam tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Peran ketiganya bukan hanya sebagai target pembangunan namun juga pelaku pembangunan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan penentu keberhasilan pembangunan, atau disebut sebagai *stakeholders* pembangunan. Peran *stakeholders* dalam pembangunan serupa dalam lingkungan korporasi yaitu menjaga tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Tugas utama *stakeholders* korporasi adalah memastikan pengelolaan perusahaan oleh jajaran direksi dilaksanakan secara tepat dan tertib guna peningkatan kinerja usaha. *Stakeholders* pembangunan juga menaruh perhatian pada kinerja penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan. Padan kata dari *stakeholders* pada lingkungan korporasi adalah *shareholders* pembangunan. Jadi penyelenggara negara maupun direksi perusahaan oleh masing-masing *stakeholders* diminta melaksanakan tata kelola yang baik (*good governance*). Penerapan *good governance* pada lingkungan penyelenggara negara, khususnya pemerintah, akan memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan suap. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan *good governance*, serta strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkannya? Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek *good governance*. Pertama, praktek *good governance* seyogyanya memberi ruang kepada pihak diluar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan

transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Seperti telah disinggung di atas, secara makro stakeholders pembangunan dapat dikelompokkan menjadi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Peran dari masing-masing menurut **Pedoman Good Corporate Governance 2006** sebagai berikut :

- Pemerintah: melaksanakan prinsip dasar kebijakan *governance* yaitu menciptakan peraturan perundangundangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum secara konsisten.
- Masyarakat: melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan yang diselenggarakan pemerintah serta terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha melalui penyampaian pendapat secara obyektif dan bertanggungjawab.
- Dunia usaha: menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.

D. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik

Dalam melaksanakan pembangunan, ketiga stakeholders diharapkan menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dikutip dari Prinsip-prinsip Good Governance, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh yang terbaik bagi masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

E. Tata Kelola yang Baik Pada Sektor Pelayanan Publik

Penerapan praktek *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*.

Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara

langsung oleh masyarakat luas. Keberhasilan mempraktekkan *good governance* pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan *good*

governance bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek *good governance* seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, Pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Keberhasilan pemerintah sering dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan *good governance* akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena memasyarakatkan *good governance* membutuhkan stamina dan daya tahan yang kuat.

F. Penerapan Tata Kelola Yang Baik Melalui Kebijakan Ekonomi

Pemerintah sebagai regulator diminta untuk melaksanakan prinsip dasar kebijakan *governance* sebagaimana yang dirumuskan dalam Pedoman GCG 2006 yaitu menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Pemerintah mendukung prinsip dasar yang digariskan dalam

Pedoman GCG 2006 tersebut. Kesungguhan tersebut antara lain tercermin pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang ini telah ditetapkan tiga kepastian yang akan diberikan kepada penanam modal,

yaitu kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan. Kepastian hak yaitu jaminan Pemerintah kepada penanaman modal untuk memperoleh haknya sepanjang

kewajibannya telah dilaksanakan. Kepastian hukum, yaitu jaminan Pemerintah untuk menempatkan peraturan perundangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Dan kepastian perlindungan, yaitu jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam kegiatannya.

Penjabaran UU tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah merupakan bagian dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang diterbitkan Juni 2007 lalu. Salah satu kebijakan penting dalam Inpres tersebut dalam rangka perbaikan iklim investasi adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi. Dalam waktu dekat akan ditetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan prosedur penanaman modal menjadi jelas dan sederhana bagi penanam modal. Selain itu telah

ditetapkan pula kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan Peraturan Presiden nomor 76 dan 77 tahun 2007. Ketentuan ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan transparansi bidang usaha yang dapat dipilih penanam modal.

Program lain yang juga penting bagi dalam rangka efisiensi dan transparansi adalah percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha. Pada bulan Juli 2007 ini direncanakan penerbitan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyempurnakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pendirian perusahaan dan ijin usaha, meliputi Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Pendaftaran Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan keluarnya ketentuan ini direncanakan proses pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi maksimal 25 hari.

Sejalan dengan upaya tersebut di atas, peningkatan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara *online* juga akan dilaksanakan. *Pilot project* sistem

pelayanan tersebut akan dilaksanakan di Batam pada akhir tahun 2007. Penerapannya secara nasional akan dimulai pertengahan tahun 2008.

Upaya lain yang juga terkait dengan penciptaan lingkungan regulasi yang kondusif dengan kebijakan *governance* adalah sinkronisasi peraturan pusat dan daerah. Melalui kebijakan ini diharapkan jumlah Perda yang menghambat investasi berkurang secara signifikan. Selain itu pembatalan Perda akan diumumkan secara luas agar masyarakat dapat ikut mengontrolnya. Peningkatan efisiensi dan transparansi tercermin juga pada

upaya memperbaiki kelancaran arus barang dan kepabeanan. Dalam kebijakan ini antara lain dilakukan program penertiban pemanfaatan ruang dan kegiatan kepelabuhanan sesuai dengan standar internasional di pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu juga dilaksanakan percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor (*custom clearance*).

Pada bidang perpajakan langkah *governance* yang dilakukan tidak hanya menyangkut efisiensi dan transparansi namun juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Hal ini akan diupayakan melalui kebijakan meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan *good governance*, dan melindungi hak wajib pajak. Dalam hal pelayanan perpajakan misalnya akan ditingkatkan *Built-in Control System* dalam tahun ini untuk wilayah Jawa dan Bali. Dengan langkah ini akan terlaksana sistem pengawasan secara otomatis atas semua penyelesaian permohonan wajib pajak Untuk peningkatan *good governance* maka akan dikembangkan sistem untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja yang ditetapkan (*quality assurance*). Sedangkan untuk melindungi hak wajib pajak akan diterapkan kode etik pegawai Ditjen Pajak secara konsisten agar tingkat pelanggaran semakin berkurang.

Langkah peningkatan efisiensi dan transparansi juga dilakukan pada sektor keuangan. Hal ini antara lain dengan mendorong pengayaan produk Sistem Informasi Debitur pada Biro Informasi Kredit. Pada akhir tahun 2007 diharapkan Biro Informasi Kredit telah memiliki kualitas pelayanan dan produk sesuai dengan standar internasional. Dengan tersedianya fasilitas ini maka masalah asimetri informasi antara debitur dengan kreditur makin teratasi.

Pada Inpres 6/2007 juga dirumuskan beberapa kebijakan dalam rangka menciptakan perlindungan investor yang semakin baik di pasar modal. Efisiensi

pasar modal akan ditingkatkan melalui penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Selain itu efisiensi pasar modal juga ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem *e-reporting*, *e-registration*, dan *e-monitoring* secara berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang maka peningkatan ketaatan penyedia jasa keuangan pada prinsip mengenal nasabah akan dilanjutkan. Kegiatan pasar modal terus didorong dengan pemberian insentif pajak, yang ketentuannya telah diterbitkan pada bulan Agustus 2007, agar semakin banyak jumlah perusahaan terbuka dan kepemilikan publik.

Kebijakan *governance* pada BUMN juga sedang dilaksanakan agar kinerjanya meningkat. Langkah yang akan dilakukan antara lain memantapkan pelaksanaan *good corporate governance* disamping melakukan restrukturisasi terhadap BUMN berkinerja

rendah. Upaya ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah agar pengelolaan BUMN didasarkan pada ketentuan yang berlaku (*ruled based*) bukan pada hubungan baik (*relational-based*).

Demikian beberapa contoh penerapan *good corporate governance* yang sedang dilakukan dalam kebijakan ekonomi. Tentunya berbagai langkah regulasi tersebut akan efektif jika didukung penuh oleh kedua pilar lain, yaitu dunia usaha dan masyarakat. dunia usaha, termasuk perbankan, diharapkan menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Selain itu pimpinan perusahaan seyogyanya menunjukkan kepemimpinan yang mampu mendorong pengelolaan yang baik hingga tingkat terbawah. Masyarakat diharapkan melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan yang diselenggarakan pemerintah serta terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha melalui penyampaian pendapat secara obyektif dan bertanggung jawab.

Dengan perkembangan *corporate governance system* yang cenderung konvergen antar negara, kiranya penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) oleh dunia usaha dan pemerintah serta masyarakat sudah merupakan keniscayaan. Hanya dengan cara tersebut, Indonesia dapat maju di arena global yang semakin kompetitif.

G. Hambatan-hambatan Good Governance

Luthfi A.Mutty (staf Ahli Wapres), dua hambatan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik :

Pertama, intervensi politik terhadap proses administrasi. Untuk kasus daerah, sudah menjadi rahasia umum bahwa, hasil pertama dari pilkada adalah “balas jasa” dan “balas dendam”.

Kedua, keterlibatan lingkaran terdalam kepala daerah untuk ikut campur dalam urusan birokrasi. Mulai dari anak hingga menantu. Dari saudara hingga ipar. Dari istri hingga mertua. Dari sopir hingga ajudan. Bahkan juga anggota tim sukses yang merasa punya andil bagi terpilihnya kepala daerah, merasa berhak untuk ikut campur urusan pemerintahan.

II. SEKILAS TENTANG KABUPATEN BENGKALIS

A. Sejarah Kabupaten Bengkulu

1. Bengkulu dalam Tinjauan Masa Prasejarah

Bengkalis sebagai salah satu kawasan di Sumatera memiliki permasalahan dalam hal bukti pra sejarah yang sama dengan daerah Sumatera pada umumnya, yakni tidak ditemukannya bukti-bukti pra sejarah berupa fosil-fosil dan artefak dan sejenisnya yang menjadi bukti fisik peradaban masa pra sejarah. Namun demikian, para ahli sejarah menyebutkan bahwa Bengkulu pada masa pra sejarah telah dihuni oleh manusia dengan pola kehidupan tradisional serta memiliki tatanan pemerintahan dalam bentuk perbatinan. Pembentukan perbatinan tersebut didasarkan pada adat istiadat, kepercayaan serta talian darah. Kepala daerah dari pemerintahan perbatinan tersebut di namakan 'batin' (bomo/ ketua adat). Kebatinan yang dikenal pada masa itu adalah perbatinan orang hutan serta perbatinan Senggoro. Pemerintahan perbatinan tersebut dimiliki oleh daerah dengan suku-suku terbelakang seperti Suku Sakai di pedalaman Pulau Rupa serta suku orang hutan yang ada di pedalaman Pulau Bengkulu.

2. Asal Usul Nama Bengkulu

Kata Bengkulu berasal dari dua kata yang digabung, yakni 'mengkal' dan 'kalis'. Mengkal memiliki makna sedih atau sebak, sementara kalis berarti sabar, tabah dan tahan ujian. Dua kata ini diambil dari pernyataan Raja Kecil kepada para pembantu dan pengikutnya saat ia tiba di Pulau Bengkulu dan bermaksud merebut tahta dari kerajaan Johor. Inilah ungkapan Raja Kecil yang menginspirasi lahirnya nama Bengkulu tersebut, "Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini. Ungkapan Raja Kecil tersebut menjadi buah bibir penduduk tempat, Baginda raja sedang mengkal tetapi masih kalis, sehingga akhirnya lahir lah persepsi, 'oh Baginda sedang mengkal'. Kata mengkal tersebut lama kelamaan berubah menjadi Bengkulu, hingga dikenal lah tempat tersebut sebagai Bengkulu.

3. Bengkulu Sebagai Basis Awal Kerajaan Siak

Bengkalis memiliki peran yang sangat penting bagi sejarah awal berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejarah ini dimulai ketika Tuan Bujang alias Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di daerah Bengkulu sekitar tahun 1722. Raja Kecil di sambut hangat oleh batin Senggoro serta beberapa Batin pucuk suku 'asli' seperti Batin Selat Tebing Tinggi, Batin Merbau dan sebagainya. Kabar bahwasannya Raja Kecil adalah pewaris tahta Kerajaan Johor menimbulkan rasa hormat yang kuat dari para Batin terhadap Raja Kecil, sehingga para Batin ini mengusulkan dibangunnya kerajaan di daerah Bengkulu. Akan tetapi kehendak ini akhirnya tidak dilaksanakan karena adanya keputusan dalam musyawarah antara Raja Kecil dengan para Batin dan Datuk pada saat itu, yakni antara lain Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Laksemana Bukit Batu, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar.

Hasil musyawarah ini menyepakati pendirian pusat kerajaan bedara di dekat Sabak Aur, yakni di kawasan Sungai Buntan sebagai salah satu anak Sungai Siak. Kerajaan tersebut akhirnya didirikan pada tahun 1723. Kerajaan inilah yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Siak Sri Indrapura yang cukup besar di kawasan Sumatera. Daerah kekuasaannya meliputi kawasan pesisir Sumatera Bagian Utara hingga mencapai perbatasan Aceh. Sejarah telah mencatat bahwa di Bengkulu lah wacana dan ide pembentukan Kerajaan Siak disepakati serta dukungan dan bantuan rakyat pada saat itu dibangun.

4. Bengkulu Sebagai Residen Timur Pesisir Sumatera

Di dalam sejarah, Bengkulu pernah menjadi residen timur pesisir Sumatera berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syarifudin dengan pihak Hindia Belanda, dimana Bengkulu diserahkan pada tanggal 26 Juli 1823. Bahkan sebelum kedatangan Raja Kecil ke Bengkulu, kawasan ini dikenal memiliki peran sebagai jalur perdagangan internasional ke Selat Malaka yang sangat strategis, dilalui oleh para pedagang internasional. Bengkulu menjadi tempat persinggahan para pedagang yang keluar masuk Sungai Siak. Peran Bengkulu sebagai jalur lalu lintas internasional semakin meningkat setelah ditemukannya hasil tambang timah dan emas di daerah Tapung (Petapahan). Pada

masa Kerajaan Gasib, Bengkalis menjadi penghubung interaksi antara Malaka dengan kerajaan di pesisir timur Sumatera.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*.

Geografis

Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 Km² dengan batas sebagai berikut ^[4]:

Utara Selat Malaka

Selatan Kabupaten Siak

Barat Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu

Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).^[5]

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.^[6]

B. Pemerintahan

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya. Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil *telur* ikan Terubuk yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga *telur ikan Terubuk* menjadi amat mahal. Kota lainnya adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak.

Daftar kecamatan

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selat Baru	424,40 km ²
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km ²
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 km ²
4	Mandau	Duri	937,47 km ²
5	Rupat	Batu Panjang	1.524,85 km ²
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 km ²
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 km ²
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 km ²

Daftar Bupati Bengkalis

 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1945-1946</p> <p>Dr. R. Sumitro</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1946-1949</p> <p>Dt. Ahmad</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1949-1953</p> <p>H. Muhammad</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1953-1958</p> <p>BA. Muktar</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1958-1960</p> <p>Abdullah Syafii</p>
1945 s/d 1946	1946 s/d 1949	1949 s/d 1953	1953 s/d 1958	1958 s/d 1960
 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1960-1974</p> <p>Zalik Aris</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1974-1979</p> <p>Himron Saheman</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1979-1984</p> <p>Ismail Yusuf</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1984-1989</p> <p>H. Johan Syarifuddin, SH</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1989-1994</p> <p>M. Azaly Djohan, SH</p>
1960 s/d 1974	1974 s/d 1979	1979 s/d 1984	1984 s/d 1989	1989 s/d 1994
 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 1995-2000</p> <p>H. Fadlah Sulaiman, SH</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS Periode 2000-2010</p> <p>Drs. H. Syamsurizal, MM</p>	 <p>BUPATI BENGKALIS</p> <p>H. Herliyan Saleh</p>		
1995 s/d 2000	2000 s/d 2010	2010 s/d sekarang		

IV. GOOD GOVERNANCE DALAM KULTUR DAN BUDAYA MELAYU

A. Tunjuk Ajar Melayu

Untuk mempelajari kultur dan budaya lokal, maka karena di Kabupaten Bengkalis merupakan daerah Suku Melayu maka harus dipelajari terlebih dahulu sifat-sifat suku Melayu melalui Tunjuk Ajar Melayu. **Tunjuk Ajar** adalah sejenis petuah, petunjuk, nasehat, amanah, pengajaran, contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Melihat kepada isi, maka tunjuk ajar berisikan **nilai-nilai luhur agama islam** yang sangat sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut masyarakat, baik orang tua, remaja dan anak-anak.

Kedudukan **tunjuk ajar** bagi orang **melayu** sangat tinggi dan penting, dan karena itu orang yang tidak memahami mengamalkan tunjuk ajar disebut **kurang ajar**. Agar kita tidak menjadi orang yang kurang ajar bacalah **tunjuk ajar melayu**.

Bertanam Budi

Apa Tanda Melayu jati
elok perangai mulia budi pekerti
sakit senang menanam budi

Apa tanda Melayu jati
Hidupnya Tahu membalas budi

Apa tandanya melayu jati,
membalas budi sampailah mati

Apa tanda Melayu jaiti,
Karena budi berani mati
Apa tanda Melayu Jati,
Temakan budi ia takuti

Apa tanda Melayu terpilih
Bertanam budi tiada memilih

Apa tanda Melayu Pilihan
Bertanam Budi jadi amalan

Apa tanda Melayu pilihan
Bertanam budi jadi amalan

Apa tanda Melayu Pilihan,
Temakan budi ia elakkan,
bertanam budi ia galakkan

Apa tanda Melayu terbilang
jujur di muka, lurus dibilang

Apa tanda Melayu bertuah
Batinya jujur dan lembut lidah.

B. Sifat Tahu Diri

Pada hakikatnya,yang dimaksud dengan sifat "tahu diri " dalam acuan budaya melayu kedaran diri pribadi terhadap hakikat hidup,tujuan hidup, akir hidup,serta berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. baik sebagai bagian masyarakat maupun sebagai hamba Allah. orang tua-tua mengatakan , orang tahu diri memiliki kesadaran yang tinggi dalam hidupnya, dengan tahu diri, ia akan tahu menempatkan diri dalam pergaulan berumah tangga maupun bermasyarakat. orang tahu diri akn berkelakuan terpuji, karena ia telah memahami kekurangan dan kelebihan dirinya dan orang lain. **Orang yang tahu diri akan sadar akan tanggung jawabnya** , baik tangun jawab terhadap diri,keluarga,masyarakat maupun bangsa dan negaranya.

Di dalam ungkapan adat disebut
yang dikatakan tahu diri
tahu hak dan kewajiban
tahu hutang beserta beban
tahu adat jadi pegangan
tahu syara' jadi sandaran
tahu sunnah jadi pedoman
tahu pusaka jadi warisan
tahu ico jadi pakaian
tahu adat dengan sopan
tahu dimana tempat makan
tahu dimana tempat berjalan
tahu hidup berkesudah
tahu mati berkekalan

C.PETUAH AMANAH

Bila kebenaran sudah terkikis, tumbuhlah sifat kejam dan bengis,
Yang berkuasa tangkis menangkis, syarak tertinggal adatpun habis,
Rakyat miskin hidup mengais, harkat musnah hartapun habis,
Bila kebenaran sudah dilanggar, disanalah tumbuh fitnah dan makar,
Sama saudara cakar mencakar, sama sebangsa tengkar menengkar,
Sama pemimpin berlaku ingkar, rusak binasa bangsa yang besar.

Ditulis oleh Tenas Effendi

Pantun Tunjuk Ajar Melayu oleh Tenas Efendi

Oleh : H.Tenas Efendi

Kalau hendak mengekalkan Melayu,
Tunjuk dan ajar hendaklah tahu,,

Supaya Melayu tetap terbilang,
Petuah amanah jadikan tiang,,

Kalau Melayu hendak berjaya,
Bekerja keras dengan sesungguhnya,
Siapa rajin, hidup terjamin,
Siapa tekun, berdaun rimbun,,

Apa tanda Melayu bertuah,
Bekerja tidak mengenal lelah,
Apa tanda Melayu bertuah,
Dalam bekerja pantang menyerah,,

Apa tanda Melayu pilihan,
Bekerja menurut tunjuk ajaran,,
Apa tanda Melayu Beradat,
Bekerja tidak meninggalkan kiblat,,

Apa tanda Melayu berilmu,
Bekerja keras ia tak malu,,,

Wahai ananda kekasih ibu,
Bekerjalah engkau sepanjang waktu,
Bekerja keras janganlah malu,
Semoga Allah memberkahi hidupmu,,

Wahai ananda dengarkan amanah,
Bekerja keras janganlah lengah,
Supaya hidupmu beroleh berkah,
Dunia akhirat mendapat faedah,,

Buku Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau) tulisan Tenas Effendy, seorang budayawan Melayu Riau.

Dalam budaya Melayu, interaksi normatif antara orang tua dengan yang muda berlangsung harmonis dan sastrawi. Dalam tradisi lisan dan belakangan sudah tertulis juga, banyak terdapat garisan kebijakan yang diperlukan dalam kehidupan yang disebut sebagai tunjuk ajar. Tunjuk ajar itu bisa memuat petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh tauladan yang dapat dijadikan referensi agar kehidupan berjalan aman dan selamat.

Menurut definisinya Tunjuk Ajar Melayu adalah segala petuah, amanah, suri tauladan, dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Mari kita lihat ungkapan-ungkapan berikut:

yang disebut tunjuk ajar,

petuah membawa berkah

amanah membawa tuah

yang disebut tunjuk ajar,

tunjuk menjadi telaga budi

ajar menjadi suluh hati

yang disebut tunjuk ajar,

menunjuk kepada yang elok

mengajar kepada yang benar

yang disebut tunjuk ajar,

mencelikkan mata

menyaringkan telinga

membersihkan hati

menyempurnakan budi

membaikkan pekerti
yang disebut tunjuk ajar Melayu,
menunjuk dengan ilmu
mengajar dengan guru
yang disebut tunjuk ajar Melayu,
menunjuk kepada yang perlu
mengajar supaya tahu
yang dikatakan tunjuk ajar dari yang tua,
petunjuknya berfaedah
pengajarannya berguna
yang dikatakan tunjuk ajar dari yang tua,
member manfaat bagi manusia
yang disebut tunjuk ajar dari yang tua,
petunjuknya mengandung tuah
pengajarannya berisi marwah
petuahnya berisi berkah
amanahnya berisi hikmah
nasihatnya berisi manfaat
pesannya berisi iman
kajinya mengandung budi
contohnya pada yang senonoh
tauladannya di jalan Tuhan

Dengan berjalannya waktu, tunjuk ajar ini cenderung makin dilupakan. Syukurlah ada seorang Tenas Effendy yang mau mengumpulkannya jadi suatu buku berjudul

Tunjuk Ajar Melayu (Butir-butir Budaya Melayu Riau). “Saya ini Cuma mengumpulkan rimah-rimah yang bertaburan,” kata beliau suatu kali dulu tentang kerja-kerja berharganya. Mudah-mudahan jadi referensi para Melayu muda

C. BUTIR-BUTIR TUNJUK AJAR

Butir-butir tunjuk ajar yaitu kandungan isi tunjuk ajar yang dipilah-pilah ke dalam beberapa kategori untuk membantu penelaahannya secara terarah. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa antara satu kategori tunjuk ajar dengan kategori lainnya tidak saling terkait, sebab hakikatnya tunjuk ajar tetaplah merupakan jalinan padu yang saling bersehati.

Yang menjadi inti dari tunjuk ajar bukanlah dilihat dari syairnya, melainkan hal yang tersiratlah yang menjadi intinya, bagaimana dengan membacanya kita dapat memahami hikmahnya untuk dijadikan acuan dalam menjalani hidup, tentunya juga tidak meninggalkan acuan pokok, yaitu al-Quran dan Hadits.

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bagi orang Melayu, agama Islam adalah anutannya. Seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran Islam dan dilarang keras bertelakai, apalagi menyalahinya. Karena, semua nilai budaya yang belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam harus “diluruskan” terlebih dahulu. Nilai yang tidak dapat diluruskan segera dibuang. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya, adat istiadat, maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa orang di luar Islam yang menganut agama Islam disebut “masuk Melayu” dan sebaliknya. Bila orang Melayu keluar dari agama Islam, tinggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Orang yang keluar dari Islam tidak lagi dianggap sebagai orang Melayu. Di dalam ungkapan adat dikatakan, “*siapa meninggalkan syarak, maka ia meninggalkan Melayu, siapa memakai syarak, maka ia masuk Melayu*” atau “*bila tanggal syarak, maka gugurlah Melayunya*”.

2. Ketaatan kepada Ibu dan Bapak

Ketaatan kepada Ibu dan Bapak yang disebut “mentaati orang tua” amat diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, “*siapa taat ke orang tuanya, di dunia selamat di akhirat pun mulia*”. Sebaliknya, barang siapa durhaka kepada ibu dan bapak, bukan saja disumpahi oleh masyarakat, tetapi akan disiksa diakhirat kelak. Sebagaimana juga yang dikatakan Rasulullah bahwa keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua dan sebaliknya.

Sastra lisan Melayu amat banyak mengisahkan keburukan anak durhaka yang hidupnya berakhir dengan malapetaka dan kemalangan. Sebaliknya, banyak pula dikisahkan kemuliaan anak yang berbakti kepada orang tuanya.

3. Ketaatan kepada Pemimpin

Ungkapan adat Melayu mengatakan:

*bertuah rumah ada tuanya,
bertuah negeri ada pucuknya*

*elok kampung ada tuanya,
elok negeri ada rajanya*

Ungkapan ini menunjukkan, bahwa dalam kehidupan manusia, baik di lingkungan kecil (rumah tangga) sampai kepada masyarakat luas, haruslah ada tuanya, yakni ada pemimpinnya. Tanpa pemimpin, kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga atau masyarakat tidak akan terjamin. Tidak agama tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa pemimpin, tidak ada pemimpin kecuali untuk ditaati. Karena untuk apa adanya pemimpin, kalau tidak ada ketaatan kepadanya. Dengan ketaatanlah segala program akan mudah dilaksanakan. Walaupun begitu, tidak mesti kita harus taklid, tanpa ada kritikan dan masukan. Kalau melihat pemimpin melenceng dari syarak yang dipercayai orang Melayu, maka lebih baiknya diberikan nasihat untuk mengingatkan dari kekhilapannya.

Dalam masyarakat Melayu pemimpin dikemukakan, “*ditinggikan seranting, didahulukan selangkah*”, Lazimnya diambil atau dipilih dari warga masyarakat yang

memenuhi criteria tertentu. Orang inilah yang dijadikan ikutan, contoh, dan teladan yang *lidahnya asin, pintanya Kabul*, yang dianggap mampu mendatangkan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena pemimpin adalah orang pilihan, berwibawa, memiliki berbagai kelebihan, sebagai contoh dan teladan, dan sebagainya, maka adat Melayu mewajibkan anggota masyarakatnya untuk mendukung dan membantunya sekuat daya masing-masing. Pendurhakaan kepada pemimpin sejati menjadi pantangan besar dan dianggap *mencorengkan orang di kening* keluarga dan masyarakat. Di dalam ungkapan adat dikatakan, "*siapa durhaka kepada pemimpinnya, aibnya tidak terbada-bada*" atau "*siapa mendurhakai yang dirajakannya, di sanalah tempat ia binasa*".

Acuan pantang mendurhakai ini ditujukan kepada pendurhakaan pemimpin yang terpuji, adil, dan benar, bukan terhadap pemimpin yang zalim, menyalah, dan sebagainya. Hal ini tercermin dalam ungkapan, "*raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah*". Jadi, pemimpin yang adil dan benar-benar sempurna wajib ditaati, sedangkan pemimpin yang zalim haruslah disanggah, dilawan, disingkirkan, atau setidak-tidaknya diberi peringatan dan teguran.

4. Persatuan dan Kesatuan, Gotong Royong, dan Tenggang Rasa

Sifat-sifat ini merupakan inti kepribadian yang diajarkan oleh orang tua-tua Melayu. Orang Melayu berprinsip bahwa pada hakikatnya manusia adalah bersaudara, bersahabat, dan berkasih sayang, maka tunjuk ajar yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, gotong royong, dan bertenggang rasa senantiasa hidup dan diwariskan secara turun temurun. Mereka juga menegaskan, bahwa prinsip-prinsip tersebut akan mampu mewujudkan kedamaian di muka bumi ini.

5. Keadilan dan Kebenaran

Bagi orang Melayu keadilan dan kebenaran adalah kunci utama dalam menegakkan tuah dan menjaga marwah, mengangkat harkat dan martabat, serta ,mendirikan daulat dan kewibawaan. Hukum yang adil wajib ditegakkan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kebenaran wajib didirikan demi terlaksananya syarak dan sunnah, petuah dan amanah, ketentuan adat lembaga, dan sebagainya.

Orang Melayu berani mati untuk membela kebenaran. Orang tua-tua menegaskan, *“takut karena salah, berani karena benar”*.

6. Keutamaan Menuntut Ilmu

Tunjuk ajar mengamanahkan agar ilmu yang dituntut hendaklah ilmu yang berfaedah dan sesuai menurut ajaran Islam, nilai adat, dan nilai luhur yang sudah ada dalam masyarakat. Orang tua-tua juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus bermanfaat bukan saja untuk kepentingan pribadi, tetapi harus juga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara. Keutamaan ilmu tercermin dalam ungkapan, *“sebaik-baik manusia banyak ilmunya, seburuk ,manusia yang buta keta”* atau *“mulia insane karena pengetahuan, hina orang ilmunya kurang”*.

7. Ikhlas dan Rela Berkorban

Sifat ikhlas dan rela berkorban menjadi sifarang tua-tua mengatakan, bahwa dengan bersifat ikhlas, setiap pekerjaan akan menajdi amal saleh yang diridhoi Allah swt. Dengan sifat ikhlas dan rela berkorban, serta rasa kesetiakawanan sosial akan semakin tinggi, mengakar, dan kemudian membuahakan persaudaraan sejati.

8. Sifat Amanah

Skifat amanah, taat, setia, teguh pendirian, dan terpercaya amat dihormati orang Melayu. Orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, menunjukkan sikap terpercaya, dan menunjukkan tahu tanggung jawab, jujur, dan setia. Dalam ungkapan dikatakan, *“ orang amanah membawa tuah,, “ orang amanah hidup berrmarwa”, dan “ orang berrmarwah dikasihi Allah”*.Ungkapan lain menyebutkan, *“ siapa hidup memegang amanah, dunia akhirat beroleh berkah”, dan “siapa hidup memegang amanah, kemana pergi tidakkan susah”*.

Orang tua-tua Melayu telah banyak mengajarkan kepada generasi-generasinya bagaimana memahami Islam secara kaffah, menyeluruh, tidak taklid, saling menghormati, dan saling menyayangi. Pengajarannya bisa dilihat dari tunjuk ajar Melayu yang banyak hikmah dan teladannya.

Tunjuk ajar Melayu bukan saja untuk orang Melayu, melainkan ia juga bisa dijadikan acuan sikap bagi siapapun yang menginginkan mengambil hikmahnya, bukan saja untuk menjadi bacaan, sastra indah, atau menunjukkan tradisi, adat, dan kebiasaan orang Melayu di negeri Melayu, melainkan ia bisa digunakan dalam sendi kehidupan dengan segala dinamikanya. Tunjuk ajar bisa dijadikan sebagai landasan hikmah menata diri, keluarga, masyarakat, dan Negara, terlebih lagi menata kampus. Jika tunjuk ajar ini di hayati dan diamalkan dalam setiap individu kampus, niscayalah apa yang menjadi tujuan pembangunan daerah akan mudah terwujud dengan kenyataan yang sebenarnya.

Selain tunjuk ajar, masih banyak lagi hal yang mesti dihayati dan dipahami maknanya dan hikmahnya, yaitu seperti gurindam duabelas, ikan terubuk, dan yang lainnya yang banyak mengajarkan tentang pengamalan ajaran Islam.

Di dalam gurindam duabelas misalnya, Raja Ali Haji mengajarkan bagaimana cara berIslam dan menjadi orang Islam yang baik. Seperti ungkapan syairnya dalam pasal pertama, "*barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama*". Begitulah salah satu syairnya yang mengajarkan agar teguh memegang agama, Islam.

Atau di dalam Ikan terubuk karya Ulul Azmi, walaupun menceritakan tentang kisah ikan terubuk, tapi Ulul ternyata menunjukkannya pada pemahaman agama yang sempurna dengan segala sendinya, kehidupan ini. Dengan ikan terubuknya Ulul ingin membuktikan bahwa orang Melayu juga memahami ilmu biologi, ilmu sejarah, Ilmu mantera-mantera, Ilmu politik, dan tentunya sangat kental dengan pemahaman agama Islam. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang syumul, sempurna, komprehensif.

Begitulah hendaknya orang Melayu, yang hidup di negeri Melayu sekarang ini bersikap, bersifat, dan beramal. Baik untuk manusia secara umum, terlebih lagi orang Melayu yang lebih paham tentang dunianya sendiri. Mudah-mudahan negeri Melayu benar-benar menjadi negeri Melayu, yang setiap aktifitas orangnya tercerminkan dari ajarannya, ajaran Islam.

D. Tunjuk Ajar Melayu untuk Pemberi Amanah

Kabupaten Bengkalis terkenal dengan negeri melayu, negeri Laksamana Raja Di Laut yang penuh dengan nilai kearifan serta kebijaksanaan. Dalam kehidupan Masyarakat melayu riau, tidak ada dikotomi antara suku satu dengan lainnya dan kemelayuan tidak pernah mengajarkan hal itu. tunjuk Ajar melayu mengajarkan Toleransi kepada yang lain.

Masyarakat propinsi riau saat ini memiliki kesadaran yang kurang dengan nilai-nilai kearifan kebudayaan yang kaya di propinsi riau termasuk tunjuk ajar melayu untuk orang yang akan memberikan amanah kepada seorang pemimpin. tunjuk ajar ini sebenarnya bukanlah hanya untuk melayu dalam arti sempit namun melayu dalam arti luas.

Tiap pemikiran serta pendapat tentang tunjuk ajar melayu hendaknya jangan mengecilkan nilai-nilai kearifan dari tunjuk ajar melayu tersebut. Sebagai kaum intelektual mahasiswa harus bisa menjelaskan kepada masyarakat awam akan nilai-nilai dari tunjuk ajar tersebut, ia bukan merupakan untuk satu golongan tertentu namun untuk semua masyarakat riau secara umum terbebas dari berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat misalnya agama, ras, suku dan lainnya.

Dalam menafsirkan Tunjuk Ajar melayu tidak boleh dikotomi antara satu golongan dengan golongan lain, suatu suku dengan suku lain, satu agama dengan agama lain karena sifatnya yang universal demi suatu kebaikan bagi yang di beri amanah.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka dengan mengutip tunjuk Ajar Melayu yang di tuliskan oleh Budayawan Riau Tenas Efendi dapat di tuliskan sebagai berikut tentang Tunjuk Ajar Untuk Pemberi Amanah dalam hal ini masyarakat jika di hubungkan dengan Pemilihan Gubernur Riau pada tahun 2013 ini.

Sebelum dituliskan ada baiknya diperhatikan kutipan berikut *“Apabila Tersalah Memberikan Amanah, niat tak sampai hajatpun punah, Banyaklah Kerja tidak Menyudah sesama kaum menjadi berbantah”*.

“Apabila Mencari Pemegang Amanah

Carilah Orang Yang Elok Tingkah

Untuk Kebaikan mau Mengalah

Untuk yang benar mau beralah

apabila keliru mengaku salah

Apabila dinasehati tidak menyanggah

Apabila di ingatkan tidak berkilah

apabila dilarang tidak berbantah

apabila di percayai tidak menyalah”

setidaknya itu suatu kutipan yang perlu sangat di pertimbangkan oleh masyarakat riau dalam memilih pemimpin riau kedepan. kutipan itu hanya sebagian kecil dari nilai-nilai kearifan dari Tunjuk Ajar Melayu propinsi Riau.

E. Tunjuk Ajar Melayu : Kepribadian Pemimpin

Globalisasi telah banyak merubah wajah kemanusiaan dan budaya kita. Jarak sudah tidak lagi jadi masalah dan kemajuan iptek demikian pesat sampai-sampai membuat orang kedodoran dengan tata-budayanya dan sering terperangkap dalam persaingan yang tidak wajar. Di era “modern” ini materialisme juga makin menonjol yang membuat tidak seimbang aspek lahiriah dan batiniah sehingga simpangan itu baru terlihat ketika kita membuka kembali lembaran-lembaran kebijakan lama yang jadi kearifan lokal.

Sebagaimana di mana pun, kearifan lokal di tanah Melayu senantiasa berlandaskan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran Ketuhanan yang diperuntukkan bagi kepribadian dan jati diri seorang insan. Dalam masyarakat terdapat dan hidup petuah-petuah Islami yang disebut Tunjuk Ajar Melayu yang dikatakan sebagai pakaian. Orang yang lupa diri atau lupa pakaian sangat mungkin akan berbuat hal-hal tercela yang dapat merugikan masyarakat dan bangsanya.

Keadaan itu dapat digambarkan dengan ungkapan yang dapat dilihat dalam sebuah buku Tunjuk Ajar Melayu tulisan Tenas Effendy, seorang budayawan Riau, sebagai berikut:

bila orang lupakan diri,
banyaklah bala yang menghampiri
bila orang lupa pakaian,
banyaklah kerja yang bersalahan
kalau sudah lupakan diri,
alamat bala menimpa negeri
kalau sudah lupa pakaian,
di situlah tempat masuknya setan
lupa diri binasa negeri,
lupa pakaian binasa iman.

V. PEMIMPIN SEBAGAI PELAKSANA IMPLEMENTASI KEPERINTAHAN YANG BAIK

A. Pendahuluan

Reformasi di Indonesia mencita-citakan adanya sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Cita-cita ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta terangkatnya martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Namun apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat sekarang ini belum sesuai dengan cita-cita tersebut.

Era reformasi satu dekade berlalu, namun pengelolaan pemerintahan Indonesia masih sarat silang-sengkarut oleh kepentingan-kepentingan elit yang tidak kunjung mendekat pada kemakmuran rakyat bersama (*bad governance*). Kaburnya standar dan komitmen moral, diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan perlakuan diskriminatif terhadap koruptor, tidak saja memperbusuk kultur birokrasi, tetapi juga merusak perilaku masyarakat dan bangunan budaya yang sehat. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah para tokoh agama dan intelektual kampus telah menjelma dan bermetamorfosis menjadi aktor politik, lalu terbawa arus, yang kemudian mengaburkan komitmen moral-intelektualnya.

Berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi sosial bangsa Indonesia tersebut, melalui tulisan singkat ini penulis bermaksud menggugah dan mengetuk hati para pemimpin bangsa ini, penyelenggara negara, wakil rakyat, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum dan semua masyarakat yang menjadi stakeholder negara dan bangsa Indonesia untuk membuka mata hati agar dapat mengedepankan moral dalam melaksanakan amanah rakyat.

Sekitar dua abad yang lalu di bumi Nusantara ini telah hidup seorang intelektual sekaligus politisi yang mempunyai keilmuan yang mumpuni, wawasan luas, kesantunan moral serta ketinggian spiritual yang bisa menjadi teladan masyarakat Indonesia sekarang ini. Dialah Raja Ali Haji (RAH). Melalui buah pikiran yang dituangkan dalam berbagai karyanya, dia mencoba memproyeksikan ilmu dan moralnya untuk membentuk masyarakat yang bermoral dan mempunyai kesalehan sosial. Etika politik yang terekam dalam karya tulisan-tulisannya kalau dicermati

sebenarnya cukup relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance/GG). Apabila buah pikiran Raja Ali Haji tersebut dilaksanakan, maka akan sangat membantu proses pembangunan sebuah tata pemerintahan yang baik di Indonesia guna mewujudkan bangsa yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, dan bermartabat tinggi.

B. Sekilas Sketsa Kehidupan Raja Ali Haji

Setidaknya, ada tiga sumber bacaan yang tergolong lengkap meng-cover kehidupan Raja Ali Haji: Pertama, Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji; Kedua, De Nederlanders in Djohor en Siak karya Elisa Netscher; Ketiga, Geschiedenis Van Indonesie karya H.J. de Graaf.

Tulisan ini hanya akan menyinggung sekilas tentang kehidupan Raja Ali Haji. Nama lengkapnya adalah Tengku Ali al-Haji bin Engku Haji Ahmad bin Raja Haji As-Syahidu fi Sabilillah bin Opu Daeng Celak. Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat Indera Sakti pada tahun 1808/1809 M. Ibunya bernama Encik Hamidah, putri Raja Selangor. Sedangkan ayahnya, Raja Ahmad, merupakan tokoh penting dalam bidang politik di Kerajaan Riau-Lingga. Jadi, Raja Ali Haji adalah cucu dari Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan IV dari Kerajaan Riau-Lingga dan merupakan keturunan bangsawan Bugis. Maka, wajarlah apabila ia sangat berpengaruh dalam pemerintahan dan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pendidikan dasarnya dimulai dari lingkungan istana Kerajaan Penyengat, terutama dari tokoh-tokoh terkemuka yang datang dari berbagai daerah, karena waktu itu di Pulau Penyengat memang banyak ulama yang berdatangan dari berbagai negeri untuk meramaikan pusat kebudayaan Melayu, khususnya melakukan kajian ajaran Islam. Beliau menerima pendidikan tradisional sebagaimana anak-anak Islam lain, yaitu dengan belajar membaca al-Qur'an dan pelajaran dasar-dasar agama Islam, khususnya tauhid dan fikih. Pada awalnya, ia dididik oleh ayahnya, Raja Ahmad yang memang terkenal sebagai seorang intelektual pada masa itu. Pengajian seterusnya didapat melalui ulama-ulama yang silih berganti datang ke Riau sejak pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far.

Pada masa itu, Riau merupakan “Kota Pelajar” yang banyak menyedot pelajar dari berbagai daerah yang kemudian berdomisili untuk mengajar dan belajar di sana. Riau memang menjadi daerah yang paling unggul dalam bidang bahasa dan kesusasteraan dibanding daerah lainnya pada masa itu. Bahasa dan sastra dipelihara dan dikembangkan secara bersemangat dan menyentuh semua kalangan. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Raja Ali Haji dengan sebaik-baiknya.

Pada tahun 1822, sewaktu masih kecil ia telah dibawa oleh orang tuanya ke Batavia. Saat itu orang tuanya, Raja Haji Ahmad, menjadi utusan Riau untuk bertemu dengan Gubernur Jendral Godart Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Ketika itulah Raja Ali Haji menemui para ulama guna memperdalam pengetahuan Islamnya, terutama ilmu fikih. Selain dapat memperdalam ilmu pengetahuan keislaman, Raja Ali Haji juga telah banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan dari pergaulan dengan sarjana-sarjana kebudayaan Belanda, seperti T. Roode dan H. van der Waal yang kemudian menjadi sahabatnya.

Sekitar tahun 1828, Raja Ahmad dan Raja Ali pergi menunaikan ibadah haji ke tanah Mekkah. Kesempatan ini dipergunakan pula oleh Raja Ali Haji untuk menambah pengetahuannya dengan tinggal dan belajar di Mekkah untuk beberapa waktu. Selama berada di Mekkah, Raja Ali Haji mencurahkan waktunya untuk memperdalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Memang ia telah mendapatkan didikan dari guru yang terpilih, tetapi penyempurnaan pengetahuannya dicapai di tanah suci Mekkah yang merupakan pusat ibadah dan pengetahuan agama. Selama di Mekkah, Raja Ali Haji sempat berhubungan dengan Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani, seorang yang terpandang di kalangan masyarakat Melayu di Mekkah. Pengasahan ilmu di sinilah yang mengantarkan sosok Raja Ali Haji menjadi ulama yang terpandang dan ilmuwan terkemuka yang produktif dengan ragam keahlian yang mencakup berbagai bidang, khususnya agama, bahasa, sastra, sejarah, hukum, dan tata negara.

Setelah kepulangan Raja Ali Haji, Kerajaan Riau-Lingga, Johor, dan Pahang bertambah masyhur. Karya-karyanya yang bersifat sejarah banyak dibicarakan oleh ahli bahasa dan sastra di Nusantara, bahkan sampai di luar negeri. Di bawah asuhan sejumlah sastrawan dengan dipelopori Raja Ali Haji, bahasa Melayu Riau

menjadi bahasa yang bernilai standar, dan bahkan menjadi bahasa resmi, bahasa nasional Indonesia.

Raja Ali Haji juga mempunyai peran yang signifikan di wilayah Kerajaan Melayu Riau pada abad XIX, terutama karena perhatian beliau pada berbagai bidang sosial budaya, yang kemudian menjadi permasalahan yang aktual dalam kehidupan manusia. Ketika saudara sepupunya, Raja Ali bin Raja Ja'far diangkat menjadi Yamtuan muda, Raja Ali Haji diangkat menjadi penasihat keagamaan negara. Perlu digarisbawahi, Raja Ali Haji adalah Muslim yang taat dan sangat berpengaruh pada masa itu. Keahliannya dalam berbagai hal seperti agama, silsilah, sejarah, kesusasteraan, dan hukum sangat mendukung eksistensinya. Karirnya di bidang politik membuat Belanda harus mengakui kepemimpinannya di kalangan masyarakat Pulau Penyengat.

Raja Ali Haji wafat pada tahun 1873, dan dimakamkan di pulau kelahirannya tersebut. Meskipun jasadnya telah tiada, namun namanya masih selalu mengorbit melalui buah karyanya yang masih menghiasi berbagai perpustakaan di Nusantara bahkan mancanegara. Karena jasanya yang begitu besar dalam bidang bahasa dan sastra, pada tahun 2004, Raja Ali Haji dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional, atas karyanya Kitab Pedoman Bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa nasional (bahasa Indonesia), dari Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono.

C. Kepemimpinan Ideal Menurut Raja Ali Haji: Tinjauan Etika Politik

Bertuah rumah ada tuannya Bertuah negeri ada pucuknya

Elok rumah ada tuannya Elok negeri ada rajanya

Ungkapan di atas merupakan ungkapan adat Melayu yang menyatakan urgensi kepemimpinan dalam sebuah komunitas. Dalam semua komunitas sangat dibutuhkan figur seorang pemimpin, baik dalam kehidupan manusia bernegara, bermasyarakat, maupun berumah tangga. Ajaran Melayu berusaha mengangkat seorang pemimpin yang lazim disebut “orang yang dituakan” oleh masyarakat dan kaumnya. Pemimpin ini diharapkan dapat membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun ukhrawi. Pemimpin seperti ini yang akan mampu memberikan kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah kepada masyarakat.

Seorang pemimpin wajib ditaati dan dihormati selama baik dan benar. Pemimpin yang diangkat oleh masyarakat disebut “ditinggikan seranting, dimajukan selangkah” yang lazimnya diambil atau dipilih dari warga masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Orang seperti inilah yang dijadikan contoh dan teladan yang “lidahnya asin pintanya kabul”, yang dianggap mampu mendatangkan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi, seorang pemimpin harus benar-benar orang pilihan yang berwibawa, memiliki berbagai keutamaan dan kelebihan untuk mendukung misi kepemimpinannya. Oleh karena itu, ia harus dihormati dan dibantu sekuat-kuatnya oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Mengenai masalah kepemimpinan dalam sebuah wilayah atau negara, Raja Ali Haji sangat menekankan pentingnya ajaran Islam, khususnya dalam praktik-praktik politik penguasa. Ajaran Islam harus menjadi basis perumusan, gerakan moral, dan etika politik pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan politik penguasa seluruhnya didasarkan pada prinsip ajaran Islam. Baginya, raja dengan moralitas keislaman merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan yang baik dalam masyarakat.

Berangkat dari pandangan ini, Raja Ali Haji berusaha membangun kembali supremasi politik kerajaan Melayu sebagai satu bangunan sosial-politik bagi masyarakat Melayu yang berlandaskan pada ajaran Islam. Untuk mewujudkan hal ini, beliau membuat kriteria pemimpin dan kepemimpinan yang ideal.

1. Kriteria Pemimpin

Sebagaimana al-Ghazali, Raja Ali Haji menghendaki adanya proyeksi nilai-nilai moral spiritual agama dari setiap Muslim ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Fenomena kemanusiaan dan keruntuhan suatu masyarakat, tidak semata-mata disebabkan oleh mundurnya pemikiran, tetapi juga oleh keruntuhan moral spiritual yang melanda para pemimpinnya. Oleh karena itu, seorang raja, selain harus menguasai ilmu pengetahuan, tata pemerintahan, dan wawasan yang luas, ia juga harus mempunyai moralitas yang tinggi.

Masyarakat yang adil dan makmur akan tercipta apabila pemimpin sebagai pelaksana amanah rakyat mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi. Karena pemimpin mempunyai peran yang sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin memegang tanggung jawab yang berat dan tugas yang mulia, maka ia harus mempunyai kepribadian yang sempurna dan berusaha terus menyempurnakannya. Karakteristik dan moralitas pemimpin merupakan masalah utama yang menjadi perhatian Raja Ali Haji, karena raja merupakan simbol kekuasaan dan kredibilitas suatu bangsa, dan pemimpin tertinggi dari suatu negara.

Mengenai betapa pentingnya menjunjung moralitas seorang pemimpin, dalam bukunya Tsamarah al-Muhimmah, Raja Ali Haji menerangkan bahwa pemimpin, dalam hal ini adalah raja suatu negeri, adalah seperti nyawa di dalam tubuh adanya, maka jika nyawa itu bercerai daripada tubuh niscaya binasalah tubuh itu,”

Terkait dengan syarat seorang pemimpin, dalam kitab Tsamarat al- Muhimmah, Raja Ali Haji mengemukakan persyaratan atau kriteria, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Syarat pemimpin yang bersifat lahir antara lain: 1) Raja harus Islam; 2) Seorang pemimpin hendaknya laki-laki; 3) Mempunyai pembicaraan yang baik; 4) Mempunyai pendengaran yang baik; 5) Mempunyai penglihatan yang baik.

Sifat-sifat di atas kalau kita lihat sekilas memang hanya bersifat lahiriyah, namun sebenarnya mempunyai nilai filosofis yang sangat tinggi. Syarat Islam pada dasarnya bukan hanya Islam secara lahir atau pengakuan secara lisan, akan tetapi secara batin seorang pemimpin harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral Islam, seperti jujur, adil, toleran, dan seterusnya. Bukan hanya itu, seorang

pemimpin harus mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam menjalankan roda kepemimpinan.

Syarat laki-laki ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai semangat yang kuat, tegas, dan pemberani. Tegas, disiplin dalam segala tindakan dan memegang teguh segala ketentuan yang berlaku. Pemimpin laki-laki dengan kata lain adalah bahwa pemimpin harus jantan. Dalam hal ini, ia patut dicontoh, jadi panutan, mempunyai akal yang sempurna, tokoh sepadan, dan gagah berani, yang menjadi “pakaian” dalam dirinya. Dalam ungkapan Melayu disebutkan “yang disebut pemimpin jantan, syarak, dan adat jadi pakaian”. Pemimpin tidak boleh kerdil, lemah semangat, berwawasan sempit, dan tidak mampu mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Sebagaimana dalam ungkapan Melayu, “pemimpin kerdil hatinya kecil, duduk selalu mencil-mencil” (pemimpin yang lemah semangat, tidak berdaya, rendah diri, dan tidak memiliki kemampuan menjadi pemimpin).

Mempunyai pendengaran dan pengelihatian yang baik berarti seorang pemimpin harus mau mendengarkan dan melihat suara hati nurani rakyat, perhatian, mengayomi, memperhatikan aspirasi mereka, dan dapat melihat realitas yang terjadi di masyarakat yang dipimpinnya. Berbicara dari hati nurani, dan bukan hanya di mulut, artinya pembicaraannya sesuai dengan realitas dan fakta, bukan hanya sekedar di mulut. Pemimpin yang hanya sekedar di mulut dalam ungkapan Melayu disebutkan, “Pemimpin mulut hanya sekedar menyebut, menjalankan tugas terkentut-kentut, kalau memikul beban hatinya kecut, menghadapi masalah nyawanya ke buntut.”[28] Oleh karena itu, Raja Ali Haji menyaratkan pemimpin harus mempunyai pendengaran, pengelihatian, dan pembicaraan yang baik. Hal ini sangat penting untuk menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif antara seorang pemimpin dan masyarakat yang dipimpin.

Adapun syarat seorang pemimpin yang terkait dengan sifat batiniyah antara lain: 1) Mukallaf; 2) Merdeka; 3) Adil; 4) Mempunyai kemampuan ijtihad yang baik; 5) Mempunyai keberanian yang kokoh; 6) Rajin, tidak malas mengurus permasalahan yang ada di dalam pemerintahannya. [29]

Mukallaf di sini berarti sudah cakap hukum, yaitu seorang pemimpin sudah dapat bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kebijakan dan semua langkahnya

dalam menjalankan roda kepemimpinan benar-benar lahir dari pemikiran yang dewasa. Karena pemimpin harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinya. Ungkapan Melayu menyatakan: “Orang beradab bertanggung jawab”.

Sedangkan syarat merdeka di sini antara lain berarti bahwa kebijakan pemimpin harus bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok dan benar-benar mandiri. Pemimpin harus benar-benar bisa memosisikan dirinya di atas kepentingan semua kelompok, kepentingan masyarakat luas yang dipimpinya. Kebijakan yang diambil tidak berdasar pada tekanan kepentingan atau pihak-pihak tertentu, independen, dan benar-benar berdasarkan suara hati nurani rakyatnya.

Prinsip keadilan bagi seorang raja lebih bernuansa penghargaan yang sama kepada semua orang dengan tidak membedakan dari mana unsur atau golongan. Hal ini dibuktikan dengan jalannya hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Adil berarti harus benar dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perilaku hukum dan undang-undang, agama, adat, dan norma sosial yang dianut masyarakat. Ungkapan Melayu “yang disebut adil, tidak membedakan besar dan kecil”.

Pada dasarnya, adil ini perspektif, artinya menurut seseorang adil belum tentu menurut yang lain adil. Namun demikian, ada pemahaman intersubyektif, bahwa adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks kepemimpinan berarti bertindak dan memberikan hak masyarakat yang dipimpinya secara proporsional dan profesional. Mendahulukan mana yang harus didahulukan, memberikan sesuatu kepada yang berhak, menindak yang melanggar aturan, tidak diskriminasi, dan sebagainya.

Mempunyai ijtihad yang baik, seorang pemimpin harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Keputusan yang diambil harus benar-benar berdasarkan pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang cermat dan matang. Selain itu, juga mempertimbangkan efek manfaat dan madharat dari keputusan atau kebijakan tersebut. Syarat ini juga berarti pemimpin harus visioner, mampu merencanakan dan menatap masa depan dengan cermat dan baik. Dalam ajaran Melayu, dinyatakan bahwa masyarakat harus berpandangan jauh ke depan, berpikiran panjang, hidup tidaklah untuk masa silam dan hari ini, tetapi juga amat penting untuk masa depan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Dengan memandang jauh ke depan, maka pemimpin diharapkan memiliki wawasan yang luas, pikiran panjang, dan perhitungan yang semakin cermat. Berpandangan jauh ke depan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap generasi berikutnya.

Seorang pemimpin, menurut Raja Ali Haji, juga harus mempunyai keberanian yang tinggi, sehingga kepemimpinannya benar-benar kredibel dan bisa lepas dari tekanan dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan kemauan rakyat. Sifat rajin berarti seorang pemimpin harus benar-benar all out dalam mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk mengurus kepentingan rakyat. Seorang pemimpin harus benar-benar siap dan mau berkorban lahir dan batin demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Membahas masalah kepemimpinan Raja Ali Haji menggunakan istilah “raja”, karena sistem pemerintahan yang ada di masa hidupnya adalah berbentuk kerajaan atau kesultanan. Apabila ditarik ke era sekarang, raja ini berarti kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kepala daerah, DPR, atau siapa pun yang mengemban amanah rakyat. Kriteria di atas menunjukkan bahwa beliau menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar mampu melaksanakan dan mencapai kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat.

Menurut Raja Ali Haji, pada hakikatnya seorang pemimpin, dalam hal ini adalah raja, merepresentasikan tiga kepemimpinan sekaligus, yaitu, pertama, pemimpin (raja) merepresentasikan eksistensi seorang khalifah. Raja sebagai khalifah maksudnya ialah raja sebagai pengganti Tuhan di bumi sekaligus pengganti Nabi Muhammad, sehingga harus melanjutkan syariat dan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedua, pemimpin (raja) merepresentasikan seorang imam. Sebagai imam, maksudnya hampir sama dengan imam shalat, yang setiap perbuatannya harus diikuti oleh makmum. Oleh karena itu, raja harus bertindak sesuai petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis, agar perbuatannya tidak menyimpang dari kehendak Allah. Itu berarti pula raja harus menghindarkan rakyatnya dari kekafiran, kemungkar, dan kemaksiatan. Ketiga, pemimpin (raja) merepresentasikan eksistensi seorang sultan. Sultan di sini maksudnya bahwa raja telah mendapat kepercayaan dari rakyat dan

segala kepentingan rakyat diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, raja harus memerintah dengan adil, bijaksana, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah. Karakteristik pemimpin ideal di atas dirumuskan dengan harapan dapat tercipta kepemimpinan yang kredibel.

Cukup lengkap kriteria pemimpin yang diungkapkan oleh Raja Ali Haji, meliputi syarat lahir dan batin. Semakin lengkap pakaian batinnya, semakin sempurna penampilannya, semakin terpuji kepemimpinannya, dan semakin dihormati orang.

2. Kepemimpinan ideal

Pemerintahan ideal, menurut Raja Ali Haji, ialah pemerintahan gaya Islam. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang kehidupan beliau, sebagai orang yang tidak hanya banyak mengetahui perihal Islam tetapi juga fanatik terhadap ajaran Islam. Raja Ali Haji menyadari bahwa dalam pandangan Islam Tuhan mempunyai posisi yang amat sentral dalam setiap bentuk dan manifestasi pemikiran. Dalam pemikiran Islam, Tuhan merupakan sumber dari kebenaran, dan kebenaran hanya datang dari Tuhan.

Menurut Raja Ali Haji, setidaknya ada tiga tugas pokok seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Tiga tugas pokok yang apabila dijalankan dengan baik akan membawa kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yaitu: pertama, seorang pemimpin (raja) jangan sampai luput dari rasa memiliki terhadap hati rakyat.[38] Hal ini penting karena pemimpin tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang dipimpinnya. Adanya pemimpin karena ada rakyat. Dengan demikian, dalam menjalankan roda pemerintahan harus terjalin hubungan yang harmonis dan seirama antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin, agar terjadi sinergi, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Raja Ali Haji pernah menyatakan “rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon; jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri,”

Kedua, pemimpin harus berhati-hati bila menerima pengaduan dari masyarakat karena menurutnya ada tiga macam pengaduan, yaitu: (1) pengaduan jenis

malaikat; (2) pengaduan jenis hawa nafsu; dan (3) pengaduan jenis setan. Dari ketiga jenis pengaduan tersebut hanya pengaduan jenis malaikat saja yang sesuai dengan hukum Islam dan harus ditindaklanjuti oleh seorang pemimpin. Ketiga, seorang pemimpin (raja) tidak boleh membeda-bedakan rakyat atau dengan kata lain tidak diskriminatif. Dengan kata lain, pemimpin harus adil.

Tiga tugas pokok di atas pada intinya menuntut raja agar dalam menjalankan pemerintahan dan kepemimpinannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan tidak bertindak sewenang-wenang atas dasar kekuasaan. Untuk menghindari kesewenang-wenangan ini, maka harus ada hukum. Kepemimpinan ideal memang membutuhkan sosok pemimpin yang ideal pula, akan tetapi seideal apapun pemimpin tersebut tanpa adanya sistem hukum yang kuat, maka kepemimpinan atau pemerintahan tidak akan berjalan efektif.

Sebaik apapun pemimpin, dalam menjalankan pemerintahannya harus dikawal dengan sistem hukum yang kuat dan baik pula. Hal ini perlu, agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan fatsun-fatsun yang ada, demi tegaknya keadilan dan bertambahnya kemakmuran masyarakat yang dipimpin. Antara pemerintahan yang baik dan hukum sangat berkaitan erat. Proses pemerintahan baru dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila disertai hukum yang mengatur hubungan hidup bermasyarakat. Sebaliknya, hukum baru dapat berfungsi dengan baik bila didukung oleh suatu pemerintahan. Pemerintahan tanpa hukum adalah anarkhi, dan hukum tanpa pemerintahan adalah angan-angan. Dalam hal ini, Raja Ali Haji menyadari benar akan arti penting dan peranan hukum dalam mendukung proses pemerintahan. Hanya saja, karena pemerintahan yang diinginkan Raja Ali Haji ialah pemerintahan yang bercorak Islam, maka hukum yang berlaku haruslah hukum Islam.

Berangkat dari logika di atas, dalam suatu pemerintahan harus ada aparat penegak hukum dan lembaga hukum atau pengadilan. Oleh karena itu, Raja Ali Haji mengemukakan pentingnya mahkamah sebagai lembaga sekaligus aparat penegak hukum.[46] Para penegak hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan perkara. Proses penyelesaian suatu perkara dimusyawarahkan dalam suatu mahkamah atau peradilan. Mahkamah atau peradilan ialah tempat mendirikan hukum atas hamba Allah. Hukum yang dimusyawarahkan dalam mahkamah inilah yang dijadikan

keputusan hukum bagi rakyat yang berpekara. Para ahli mahkamah dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti kode etik, seperti tidak sombong, takabbur, bersikap adil, menjaga sopan santun, tidak bergurau, serta menguasai hukum Allah.

Sosok pemimpin dan penegak hukum yang ideal, menurut Raja Ali Haji, adalah orang yang bertingkah laku baik dan melakukan kebaikan karena memiliki ruhani, jasmani, dan nama baik, yaitu “nama yang indah dan patut” sesuai dengan tuntunan agama dan dilihat oleh orang-orang yang mempunyai mata hati, berakal, yaitu orang patut-patut dan orang-orang patut.

Intinya, pemikiran Raja Ali Haji menghendaki adanya seorang pemimpin yang mampu menjaga kredibilitas disiplin, konsisten, komitmen, visioner, dan hidup sederhana—artinya tidak berlebihan dalam segala sikap dan tindakan. Dengan demikian, ia mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, sehingga tercipta masyarakat yang adil makmur dan sejahtera serta bermoral.

D. Relevansi Konsep Kepemimpinan Ideal Raja Ali Haji dengan Good Governance (GG)

Governance dalam perspektif penyelenggara negara merupakan pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administratif. Kewenangan tersebut untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mekanisme, proses, dan hubungan antarwarga negara dan kelompok kepentingan. Kewenangan inilah yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga serta menengahi atau memfasilitasi jika terjadi perbedaan kepentingan antarkelompok. Untuk itu, penyelenggara negara mempunyai tiga pilar, yaitu economic governance, political governance, dan administrative governance.

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi dan mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya

organisasi sesuai dengan ketiga prinsip di atas, sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan menegakkan sistem good governance dalam suatu organisasi diharapkan terjadi peningkatan dalam hal: Pertama, efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholder lainnya, adalah solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Kedua, legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. Keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate.

Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tata Pemerintahan yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan semua komponen terkait;
2. Transparan dan bertanggung jawab;
3. Efektif dan adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) juga mempunyai prinsip-prinsip yang tidak terlepas dari prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sebagaimana GCG, prinsip-prinsip GG meliputi transparansi, responsibilitas, partisipatif, dan non-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Mutu kepemimpinan di semua tingkat kehidupan masyarakat sangat menentukan perjalanan kepemimpinan. Kalau para pemimpin jujur, terbuka, rendah hati, adil, berdedikasi tinggi, bebas pamrih, bertanggung jawab, berorientasi pada prestasi dan pada pelayanan masyarakat, dapat dipercaya dan bersedia untuk memimpin dan mendahului juga dalam berbuat kebajikan atau pengorbanan, maka etos kerja mereka yang dipimpin dengan sendirinya akan terangkat.

Pada dasarnya, kalau kita cermati karakteristik dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di atas mempunyai persamaan dan korelasi yang erat serta relevan dengan pola kepemimpinan yang ideal dalam perspektif Raja Ali Haji. Hal ini bisa kita lihat dari prinsip-prinsip yang digunakan. Misalnya, syarat mengikutsertakan semua komponen terkait (partisipatif). Ciri ini secara tidak langsung relevan dengan pandangan Raja Ali Haji tentang tugas (wazhifah) seorang pemimpin yang harus melibatkan masyarakat yang dipimpinnya, agar kepemimpinannya dapat berjalan lancar dan efektif. Pemimpin tidak boleh luput dari rasa memiliki hati rakyat,[54] Dalam menjalankan roda kepemimpinan harus ada jalinan erat yang harmonis dan seirama antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin, agar terjadi sinergi, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik.

Berdasarkan prinsip di atas, maka kesenjangan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin harus dihilangkan, atau setidaknya dikurangi. Dalam konteks Indonesia, pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah, yang dilakukan secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat yang berkepentingan dapat ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Karena masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Prinsip lain yang sesuai dengan pemikiran Raja Ali Haji adalah prinsip menjamin adanya supremasi hukum. Ciri ini relevan dengan pendapat Raja Ali Haji yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik harus dikawal dengan sistem yang baik pula. Hukum di sini mencakup peraturan, lembaga hukum dan aparat penegaknya. Raja Ali Haji menyadari benar akan arti penting dan peranan hukum dalam mendukung proses pemerintahan.

Pemerintahan yang baik memang harus dikawal dengan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat pokok dalam sebuah negara agar prinsip-prinsip GG dapat diimplementasikan. Karena ada kaitan yang erat antara suatu bidang dengan bidang yang lain. Tata kelola yang baik tidak hanya terkait dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan hukum, politik, budaya, dan bidang-bidang yang lain. Pembuat kebijakan publik misalnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keseimbangan antara peraturan yang dibuatnya dengan perjanjian yang dibuat. Hukum dan pelaksanaannya merupakan bagian yang sangat esensial bagi terwujudnya good governance.

Implementasi prinsip GG secara efektif memerlukan hukum sebagai sarana untuk mendorong ditaatinya nilai-nilai etis tersebut dalam kepemimpinan. Dalam melindungi berbagai pihak yang terkait (stakeholder) diperlukan penegakan hukum (law enforcement) dan regulasi yang terkait dengan implementasi prinsip-prinsip GG ini secara privat (perdata) dan publik.

Selanjutnya, prinsip transparansi dan bertanggung jawab atau responsibilitas. Prinsip transparan menghendaki adanya keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material mengenai pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan prinsip bertanggung jawab menghendaki adanya pertanggungjawaban pelaksana pemerintahan atas segala kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan, baik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat. Prinsip ini sesuai dengan pandangan Raja Ali Haji bahwa seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah. Hal ini karena seorang pemimpin merepresentasikan seorang Khalifah. Dengan demikian, ia merupakan menjadi pengganti Nabi Muhammad dan sebagai pengganti Tuhan di bumi, sehingga harus

melanjutkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ia harus bertanggung jawab atas segala tindakannya kepada Tuhan.

Mengenai prinsip bertanggung jawab, dalam GG, pertanggungjawaban harus dicantumkan dalam sebuah peraturan. Peraturan itu juga harus menentukan antisipasi persoalan antara pemerintah dan stakeholder yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara pemerintah dan stakeholders. Di samping itu, ditentukan secara cukup dan jelas fungsi, hak, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jajaran birokrat dalam pengelolaan atau pemerintahan.[56] Prinsip tanggung jawab dan transparansi termasuk pula publikasi yang akurat, dan arti tanggung jawab terhadap seseorang adalah kunci dari sebuah keputusan.

Prinsip transparansi dalam pemerintahan berkaitan dengan prinsip keadilan. Oleh karena jalannya prinsip keadilan harus didukung oleh transparansi keadaan pemerintahan. Wujud nyata prinsip ini antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena prinsip transparansi tersebut dapat berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien. Barry A.K. Rider mengatakan, "Sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman."

Karakteristik tata pemerintahan yang baik selanjutnya adalah efektif dan adil. Karakter ini sesuai dengan pemikiran Raja Ali haji yang menyatakan bahwa seorang pemimpin merepresentasikan seorang sultan dalam menjalankan kepemimpinannya. Sultan di sini maksudnya bahwa raja telah mendapat kepercayaan dari rakyat dan segala kepentingan rakyat diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, raja harus memerintah dengan adil, bijaksana, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadis.

Dalam good governance, peraturan berkenaan dengan pengelolaan atau pemerintahan harus menentukan jaminan yang cukup dan secara tegas dengan sanksi yang cukup, di mana pelaksanaan pemerintahan dikelola dengan adil. Di samping itu, tata kelola pemerintahan itu harus menentukan secara cukup antisipasi terhadap kemungkinan praktik pemerintahan yang dapat merugikan. Selanjutnya,

peraturan tersebut harus menentukan secara cukup bahwa setiap kebijakan publiknya harus dapat dilaksanakan secara efektif.

Formulasi prinsip keadilan tersebut, juga harus melakukan pendekatan pada prinsip pengawasan, di mana kepemimpinannya mempunyai peran yang cukup untuk mengawasi pemerintahan. Alasan dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan.

Hampir semua kalangan sepakat bahwa penerapan GG dalam sebuah negara merupakan sebuah keharusan, namun hal ini tidak akan berarti tanpa adanya penegakkan hukum. Karena GG lebih merupakan etika politik dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (mandatory). Lalu bagaimana prinsip-prinsip etik ini akan berjalan efektif pada pemerintahan di Indonesia? Oleh karena itu, penerapan GG perlu pengawal yang tegas, yaitu penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Banyak peraturan hukum yang mewajibkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, antara lain:

1. Tap MPR No. XI tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 32 tahun 2004;
3. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. PP No. 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan berbagai peraturan hukum tersebut belum menghasilkan apa yang diharapkan oleh semua pihak, bahkan KKN semakin merajalela. Peraturan dan perundang-undangan yang sudah dibuat dengan susah payah seringkali dinafikan dan diabaikan, sehingga hukum sangat sulit untuk ditegakkan. Padahal, untuk mewujudkan *good governance* pelaksanaan aturan-aturan di atas mutlak dibutuhkan. Pelaksanaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum merupakan pilar utama yang menopang kelangsungannya. Oleh karena itu, sekali lagi penulis tegaskan tentang perlunya pengawalan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan GG di Indonesia. Demikian juga, penegakan hukum harus dikawal dengan etika moral. Sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan, sebagaimana dinyatakan oleh H.L.A. Hart dalam bukunya *General Theory of Law and State* (1965), hukum harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral, dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral, demikian dikatakan oleh Jeffrie Murphy dan Jules Coelman dalam buku *The Philosophy of Law* (1984).

V. PEMIMPIN IDEAL UNTUK PENGGERAK GOOD GOVERNANCE

1. Pendahuluan

Enam puluh dua tahun sudah bangsa Indonesia “merdeka”. Perjalanan setengah abad tersebut seharusnya mampu membawa negara ini menuju arah yang lebih baik. Pembangunan-pembangunan terus digalakkan oleh pemerintah. Namun, seribu satu masalah tetap datang, sehingga negara yang dahulu disebut sebagai “Macan Asia”, kini terpuruk dalam segala aspek kehidupan. Indonesia sebagai negara besar yang disegani oleh masyarakat internasional, dihormati negara-negara Asia, dan ditakuti oleh anggota ASEAN kini menjadi dongeng yang memenuhi lembaran buku-buku pelajaran sekolah. Martabat dan harga diri bangsa kini banyak dipertanyakan, jatidiri bangsa entah hilang ke mana.

Bangsa Indonesia semakin terpuruk tatkala para pemimpinnya berlomba-lomba memainkan peran buruk dalam dunia politik. Definisi politik sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan masyarakat umum secara menyeluruh tampak tak mendapat tempat di negeri ini. Para elite politik tak lagi berusaha memperjuangkan kehidupan rakyat, melainkan berlomba-lomba menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Etika Politik hanya menjadi barang langka yang sulit ditemukan dalam wajah para politikus Indonesia. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan. Etika politik harus ditata ulang dan menjadi *rule of the game* dalam berpolitik. Indonesia harus bangkit dari segala keterpurukan.

Indonesia memiliki banyak tradisi dan adat istiadat luhur yang mengatur bagaimana seharusnya sistem politik berjalan. Salah satu tradisi luhur tersebut adalah khazanah budaya Melayu. Sebagai wilayah kultural yang memiliki sejarah masa lalu yang gemilang, Melayu menawarkan khazanah politik yang sangat baik. Latar belakang sejarah yang melahirkan beberapa kerajaan besar, membuat Melayu menjadi bangsa yang ulung dalam pemerintahan. Sistem pengetahuan, sistem pemerintahan, dan adat-istiadat terekam jelas dalam teks-teks dan berbagai khazanah tradisi Melayu klasik. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila kita kembali pada khazanah Melayu yang merupakan pembentuk karakter bangsa ini.

2. Wajah Politik Indonesia Kini

Di tengah budaya paternalistik yang selama ini berkembang atau dikembangkan di Indonesia, masalah kepemimpinan politik menjadi agenda yang tidak kunjung usai. Alasannya, kepemimpinan politik yang kemudian diterjemahkan dalam watak budaya politik, mempengaruhi persepsi serta praktik bernegara dan berdemokrasi di negeri ini. Perbedaan pola kepemimpinan, budaya politik, dan hubungan kelembagaan yang ada selama ini menunjukkan semua itu. Menurut Ignas Kleden, selama ini masyarakat Indonesia telah terbiasa hidup dengan utopia. Dengan utopia itulah, bangsa ini mengarungi masa depan yang tidak pasti. Utopia tersebut merupakan akibat dari ulah para politisi yang tidak mengindahkan etika dalam berpolitik. Akibatnya, rakyat menjadi korban dan selalu dibayangi mimpi-mimpi semu tentang kesejahteraan yang sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan para aktor politik.

Cerita-cerita seputar politisi Indonesia sebagian besar adalah cerita tentang keburukan dan kekalahan, yang berdampak pada keterpurukan dan kehancuran sebuah bangsa. Ironis, negara dengan kekayaan alam yang demikian melimpah terpuruk hanya karena ulah segelintir orang. Bangsa ini akhirnya terjatuh ke jurang *the self-destroying nation*, bangsa yang sedang menghancurkan diri sendiri. Akhirnya, bukannya bangkit, bangsa ini malah terpuruk lebih dalam lagi ke jurang kehancuran yang nyata.

Mari kita tengok betapa menyoloknya penguasa dan politisi negeri ini mengamalkan gagasan-gagasan Machiavelli. *Pertama*, dalam rangka meraih kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seseorang dapat melakukan cara apapun untuk meraih kekuasaan (*the ends justify the means*). Ia juga harus berhasil menarik hati, simpati, dan kepercayaan rakyat, karena dari tangan rakyatlah kekuasaan diperoleh. Oleh karena itu, seorang politisi dituntut untuk mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat menarik hati dan simpati rakyat dalam berbagai situasi dan kondisi. Dinamika sosial masyarakat Indonesia dimanfaatkan dengan jeli oleh para politisi. Pada kondisi di mana rakyat sangat membutuhkan seorang sosok pemimpin yang kuat dan tegas, yang dianggap mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa, tampillah pemimpin dan politisi yang berkarakter kuat seperti itu.

Pada kondisi di mana taraf berpikir rakyat stagnan, tampillah sosok politisi yang dianggap mampu membawa angin perubahan serta pembaharuan ekonomi dan politik. Pada kondisi sosial politik memungkinkan diterapkannya diktatorisme, tampillah sosok militer yang kemudian mendominasi institusi-institusi politik. Pada kondisi saat ini yang lebih bebas, tampillah politisi-politisi yang saling berlomba-lomba menarik simpati rakyat dengan beragam karakter yang ingin mereka tampilkan. Ada yang seolah-olah sangat dekat dan sangat peduli dengan rakyat, ada yang tampil dengan penampilan dan gaya bicara yang memikat, ada yang keberhasilannya dalam bisnis bisa menarik kepercayaan rakyat, dan lain sebagainya. Mereka pun berani mengeluarkan uang ratusan miliar demi kekuasaan yang didambakan itu. Bagi mereka, hal itu sudah wajar. Ibarat investasi, pastilah hasil yang diperoleh lebih besar dari modal yang dikeluarkan

Kebijakan penguasa cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka menjual aset-aset negara, menggadaikan sumber daya alam negeri ini, mencabut subsidi (baca: hak dasar warga negara), mementingkan kepentingan bisnis pribadinya, korupsi, menyelewengkan dana pembangunan, dan masih banyak lagi. Siapa sangka, semua citra yang mereka tampilkan di muka rakyat hanyalah demi meraih kekuasaan semata.

Kedua, dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang politisi harus memiliki dua sifat, yaitu sifat manusia—tulus, penyayang, baik, pemurah—tetapi juga memiliki sifat-sifat binatang atau sifat tidak terpuji, jahat, kikir, licik, bengis, dan kejam. Machiavelli berpendapat bahwa penguasa negara bisa menggunakan cara binatang, terutama ketika menghadapi lawan-lawan politiknya. Ia juga bisa menggunakan sifat-sifat manusia untuk memelihara simpati rakyatnya. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bisa menjadi singa (*lion*) di satu saat, dan rubah (*fox*) di saat yang lainn. Menghadapi musuhnya yang ganas bagai seekor serigala, penguasa hendaknya bisa berperangai seperti singa, karena dengan cara itulah ia bisa mengalahkan lawannya. Tetapi, penguasa harus bersikap seperti rubah bila lawan yang dihadapinya adalah perangkap-perangkap musuh. Bukan singa yang mampu mengendus perangkap-perangkap itu, melainkan rubah. Rubah amat peka dengan perangkap yang akan menjerat dirinya.

Tak heran banyak penguasa yang bermuka dua. Di depan rakyat, penguasa selalu bersikap manis, baik dan tulus, namun dibelakang rakyat, penguasa itu

mengkhianatinya. Korupsi, tindakan asusila dan kriminal pejabat, baik di pusat maupun di daerah senantiasa menjadi headline di media-media cetak dan elektronik tanah air. Hal ini juga menjelaskan mengapa koalisi politik yang hanya seumur jagung. Artinya, begitu kepentingan pihak-pihak yang berkoalisi telah terpenuhi, maka bubar pula koalisi-koalisi politik itu. Atau koalisi politik juga bisa bubar karena masing-masing partai lebih mementingkan nasib partainya sendiri. Koalisi politik juga bisa terbentuk jika mereka memiliki musuh bersama (*common enemy*), begitu musuh bersama berhasil disingkirkan bubar pula koalisi-koalisi politik itu.

Ketiga, pemisahan agama dari kekuasaan. Machiavelli tidak anti agama. Ia malah menyarankan agar setiap penguasa mempertahankan dan memelihara ritual ibadah keagamaan dan senantiasa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itu, tambahnya, republik akan terbebas dari kebobrokan (korup), menumbuhkan harapan dan semangat rakyat, mengendalikan tentara, menghasilkan orang-orang baik, dan menjaga persatuan.

Dengan pandangan seperti ini, agama akhirnya didudukkan pada wilayah di mana ketika ia dianggap memberikan manfaat bagi penguasa, maka ajaran agama akan dipakai. Jika dianggap tidak bermanfaat bagi kekuasaan (pemerintahan), agama tidak dipakai. Ini membuat praktik beragama akan tergantung pada selera penguasa. Bahkan, dapat digunakan sebagai justifikasi (pembenaran) kebijakan publik yang sebenarnya tidak bersumber dari agama tersebut.

Pemaparan di atas adalah cermin yang menampakkan betapa kacaunya wajah dunia politik negeri ini. Etika telah menjadi barang langka bagi aktor-aktor politik. Dunia politik seakan hanya menjadi arena panggung “dagelan” sandiwara semata. Dunia politik tak lagi menjadi sebuah metodologi komunikasi yang menempatkan kepentingan semua pihak sebagai poros utama proses politik, melainkan ruang unjuk kebolehan kelompok *vis a vis* negara ataupun individu *vis a vis* individu menunjukkan berbagai sifat inkonsistensi, anomali, dan kontradiksi dalam setiap tindakan. Ironi politik adalah ruang tempat para aktor politik berpura-pura dan memainkan peran palsu.

3. Menggali Khazanah Politik Melayu

Perjalanan bangsa Indonesia sejak beberapa abad yang lalu menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kebudayaan Melayu. Salah satu sumbangan terbesar adalah turut mewujudkan dan membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Tak berlebihan apabila akhirnya kebudayaan Melayu disebut sebagai akar jati diri bangsa ini. Pengaruh Melayu bagi bangsa Indonesia pada umumnya meliputi banyak hal, di antaranya adalah khazanah dalam budaya politik.

Sebuah kitab mahakarya budaya-politik-peradaban Melayu adalah *Taj al-Salatin* (Mahkota Raja-raja) karangan Bukhari al-Jauhari pada tahun 1630. Buku ini merupakan panduan untuk memerintah bagi raja-raja Melayu seperti Kedah dan Johor.

Kitab *Taj al-Salatin* dalam(<http://www.rajaalihaji.com>) memberi sumbangan penting bagi pembentukan tradisi dan kultur politik Melayu dengan memberi rincian tentang syarat-syarat menjadi raja (mencakup syarat yang bersifat jasmaniyah dan rohaniyah). Kitab ini bahkan juga digunakan oleh beberapa penguasa di pulau Jawa pada abad 17-18. *Taj al-Salatin* begitu berpengaruh hingga abad ke-19 ketika Munsyi Abdullah mencoba mengenal atau mengetahui watak Raffles dari air mukanya berdasarkan ilmu firasat di dalam buku tersebut. Dalam bukunya *Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Kelantan*, Abdullah telah menasihatkan raja-raja di negeri itu supaya membaca *Taj al-Salatin* untuk mengetahui tanggung jawab sebagai raja.

Bukhari menggariskan ada 10 sifat raja atau pemerintah yang baik, sebagai berikut:

1. Tahu membedakan baik dengan yang buruk.
2. Berilmu.
3. Mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar.
4. Baik rupa dan budi pekertinya supaya dikasihi dan dihormati rakyatnya.
5. Pemurah.
6. Mengenang jasa orang atau tahu balas budi.

7. Berani; jika berani maka pengikutnya juga akan berani.
8. Cukup dalam makan tidur supaya tidak lalai.
9. Mengurangi atau tidak berfoya-foya atau tidak “bermain” dengan perempuan.
10. Laki-laki.

Tradisi politik Melayu juga mengenal pola hubungan raja dengan rakyat. Dalam beberapa hal pola ini bisa disebut sebagai satu “mekanisme kontrak” antara dua pihak yang berkepentingan. Kendati memang sangat simbolik, teks sejarah Melayu dalam beberapa bagian menekankan adanya kewajiban raja dan rakyat untuk tidak saling merusak posisi masing-masing. Teks tersebut memperkenalkan konsep musyawarah, yang juga diadopsi dari tradisi politik Islam, sebagai aturan dalam sistem perilaku politik raja dan penguasa Melayu.

Etika para penguasa Melayu diturunkan dari konsep-konsep Islam. Hal ini dikarenakan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Melayu. Keidentikkan Islam Melayu dan Melayu Islam menjadi sebuah identitas karakter yang hingga kini melekat dalam budaya Melayu. Nuansa Islam sangat kental mewarnai pola pemerintahan dalam budaya Melayu. Hal ini bisa dilihat dari salah satu penggalan kitab *Sulalat al-Salatin* berikut ini:

“Hai anakku, ketahui olehmu bahwa dunia ini tiada akan kekal adanya...melainkan iman... adapun peninggalku ini hendaklah anakku berbuat ibadat sangat-sangat, jangan tiada sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah kepadamu. Jikalau kesukaran baginya hendaklah segera engkau tolong, jikalau teraniaya ia hendaklah segera engkau periksa baik-baik supaya di akherat jangan diberatkan Allah atasnya lehermu... syahadan hendaklah engkau muafakat dengan segala perdana menteri dan segala orang besar-besar, kerana raja-raja itu jikalau bagaimana sekalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tiada ia muafakat dengan segala pegawai, tiada akan sentosa adanya, dan tiada akan dapat ia melakukan adilnya; rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar-akar nescaya tiada akan dapat berdiri.”

4. Sifat Pemimpin Ideal

Dalam khazanah politik Melayu, pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Arti raja atau penguasa dimaknai oleh bangsa Melayu lewat pepatah lama:

Yang didahulukan selangkah

Yang ditinggikan seranting

Yang dilebihkan serambut

Yang dimuliakan sekuku

Pepatah tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang raja haruslah sosok manusia yang dapat dijangkau oleh rakyat biasa. Penguasa harus berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Raja bukanlah dewa yang tak tersentuh oleh manusia, melainkan sosok yang hanya diberi beberapa kelebihan seperti di atas.

Lebih lanjut, khazanah politik Melayu juga memaparkan secara terperinci apa saja kriteria seorang pemimpin yang baik. Banyak pepatah lama dan karya-karya sastra berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pemaparan-pemaparan mengenai konsep kepemimpinan yang baik. Berikut ini adalah kriteria-kriteria pemimpin yang baik menurut konsep Politik Melayu.

A. Sebagai pemimpin banyak tahunya

Tahu duduk pada tempatnya

Tahu tegak pada layaknya

Tahu kata yang berpangkal

Tahu kata yang berpokok

Seorang pemimpin yang baik haruslah mempunyai banyak pengetahuan. Penguasa harus mengetahui bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus berfikir, bagaimana kondisi rakyat, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penguasa dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada sekaligus mencegah munculnya permasalahan baru. Tanpa pengetahuan yang memadai, sang penguasa akan kesulitan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Pengetahuan mutlak diperlukan seorang pemimpin untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemerintahan hampir dapat dipastikan berjalan lancar apabila seorang raja mengetahui apa yang baik untuk rakyatnya dan apa yang harus dihindari karena tidak baik untuk rakyatnya. Penguasa akan mudah dalam memimpin apabila ia tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tak boleh dilakukan. Tanpa pengetahuan, seorang pemimpin tak akan memiliki visi yang besar. Kalaupun ia memiliki visi besar, pastilah ia akan kesulitan merealisasikannya.

B. Sebagai pemimpin banyak tahannya

Tahan berhujan mau berpanas

Tahan bersusah berpenat lelah

Tahan berlenjin tak kering kain

Tahan berteruk sepepak teluk

Penggalan syair di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki mental “bertahan” yang baik. Ketabahan dan kesabaran menjadi salah satu sifat dari pemimpin ideal untuk menjamin tetap terjaganya komitmen dari sang pemimpin. Selain itu, sikap tawakkal juga dianjurkan di sini. Tawakkal berarti pasrah, namun bukan berarti menyerah pada masalah. Kepasrahan tersebut dilakukan setelah melakukan usaha yang maksimal. Dengan kata lain, orang Melayu memaknai terminologi tawakkal sebagai penyerahan hasil kepada Allah dari usaha yang dilakukan manusia.

Kritik-kritik tajam dan keluhan-keluhan akan banyak ditemui oleh seorang pemimpin. Terlebih apabila kekuasaannya memiliki oposan yang cukup kuat. Kritik tajam akan sangat tidak tepat apabila direspon dengan sikap arogan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ketahanan untuk menerima semua itu dan memikirkannya secara mendalam. Pemimpin yang buruk biasanya akan marah apabila dikritik. Ia akan mencari seribu dalih untuk menegasikan kritik tersebut. Bahkan, terkadang kritik-kritik tersebut ditanggapi dengan emosi. Lebih buruk lagi apabila kritik dianggap

sebagai fitnah untuk menjatuhkannya. Pemimpin yang baik tidak melakukan semua itu. Ia akan menerima kritik dengan lapang dada dan menghargainya sebagai sebuah nasihat.

C. Sebagai pemimpin banyak bijaknya

Bijak menyukat sama papat

Bijak mengukur sama panjang

Bijak menimbang sama berat

Bijak memberi kata putus

Kebijakan adalah sifat yang mutlak harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Oleh karena itu, tradisi Melayu selalu memosisikan sifat bijak sebagai salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang raja atau penguasa. Kebijaksanaan sangat erat kaitannya dengan ketepatan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, akhirnya kebijaksanaan tersebut akan bermuara pada baik atau buruknya pemerintahan yang sedang berlangsung. Tanpa kebijakan, pemimpin akan mudah sekali terjerumus dalam tindakan dan keputusan yang sewenang-wenang.

D. Sebagai pemimpin banyak cerdiknya

Cerdiknya mengurung dengan lidah

Cerdik mengikat dengan adat

Cerdik menyimak dengan syarak

Cerdik berunding sama sebanding

Cerdik mufakat sama setingkat

Cerdik mengalah tidak kalah

Cerdik berlapang dalam sempit

Cerdik berlayar dalam perahu bocor

Cerdik duduk tidak suntuk

Cerdik tegak tidak bersundak

Selain memiliki pengetahuan yang cukup, seorang pemimpin harus mencerminkan diri sebagai orang yang cerdik. Kecerdikan di sini dapat diartikan sebagai proses pengolahan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai keputusan yang paling tepat

dalam menangani masalah. Sebagai seorang pemimpin, ia pasti berkuat dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah kecerdikan untuk menghasilkan solusi yang tepat. Tanpa kecerdikan, seorang pemimpin akan rentan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan yang salah atau tidak efektif tentu akan berpengaruh pada berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. Inilah yang menjadi alasan mengapa kecerdikan diperlukan dalam proses memimpin.

E. Sebagai pemimpin banyak pandainya

Pandai membaca tanda alamat

Pandai mengunut mengikuti jejak

Pandai menyimpan tidak berbau

Pandai mengunci dengan budi

Pengetahuan dan kecerdikan tidaklah lengkap apabila tidak dilengkapi dengan sifat pandai. Kepandaian dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai kemampuan analisis yang baik terhadap masalah-masalah yang ada. Dengan ditunjang adanya pengetahuan yang cukup, ditambah dengan kepandaian dalam analisis, maka pemimpin harus cerdik dalam mengambil setiap keputusan. Analisis adalah bagian terpenting dalam usaha penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kemampuan analisis yang baik sangat dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik. Pepatah lama mengatakan: "*Bagi yang pandai, mana yang kusut akan selesai; orang yang pandai pantang memandai-mandai*". Tampak sekali bahwa kepandaian sangat berperan besar dalam mengurai "benang kusut". Tanpa kepandaian, benang kusut tersebut takkan pernah selesai untuk diurai, walaupun dapat dilakukan pastinya akan memakan waktu yang lama.

F. Sebagai pemimpin banyak arifnya

Di dalam tinggi ia rendah

Di dalam rendah ia tinggi

Pada jauh ianya dekat

Pada yang dekat ianya jauh

Arif dan bijak mungkin adalah dua kata yang memiliki makna yang sangat dekat. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang menyamakan dua kata tersebut. Namun, dalam konteks Melayu, dua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Arif lebih merujuk kepada kemampuan pembawaan diri dalam proses sosialisasi, sedangkan bijaksana lebih mengarah kepada pengolahan pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Seorang raja atau pemimpin akan lebih dihormati apabila ia memiliki kearifan dalam bertindak. Kearifan yang dimiliki pemimpin akan menambah rasa kepercayaan rakyat bahwa ia memang benar-benar figur yang cocok untuk memimpin.

G. Sebagai pemimpin mulia budinya

Berkuasa tidak memaksa

Berpengetahuan tidak membodohkan

Berpangkat tidak menghambat

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan seseorang yang hanya diberi kekuasaan untuk memuaskan ambisi pribadinya. Oleh karena itu, bagi bangsa Melayu, sifat sewenang-wenang dalam memerintah pantang dilakukan oleh seorang pemimpin.

H. Sebagai pemimpin banyak relanya

Rela berkorban membela kawan

Rela dipapak membela yang hak

Rela mati membalas budi

Rela melangas karena tugas

Rela berbagi untung rugi

Rela beralah dalam menang

Rela berpenat menegakkan adat

Rela terkebat membela adat

Rela binasa membela bangsa

Pemimpin adalah seorang yang harus membela kepentingan rakyatnya. Ia harus rela untuk banyak hal demi terpenuhinya kepentingan warganya. Syair di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus rela sengsara demi membela hak, ia harus rela membela kawan meski harus berkorban. Ia juga harus rela dalam kesulitan ketika rakyatnya kesulitan, mengusahakan kebahagiaan untuk rakyatnya saat ia bahagia. Jiwa patriotisme juga ditanamkan di sini karena bela negara memang sangat dianjurkan. Bahkan, seorang pemimpin harus rela mati demi membela bangsanya, serta rela berpenat dan terkebat dalam membela adatnya. Bagaimanapun seorang pemimpin memang difungsikan sebagai orang yang bersedia berkorban demi orang banyak.

I. Sebagai pemimpin banyak ikhlasnya

Ikhlas menolong tak harap sanjung

Ikhlas berbudi tak harap puji

Ikhlas berkorban tak harap imbalan

Ikhlas bekerja tak harap upah

Ikhlas memberi tak harap ganti

Ikhlas mengajar tak harap ganjar

Ikhlas memerintah tak harap sembah

Terminologi rela memiliki pengertian yang berbeda dengan ikhlas. Bila rela adalah sebuah bentuk siap untuk berkorban, maka ikhlas lebih mengarah kepada pengelolaan niat. Hal ini sangat jelas disuarakan dalam pepatah lama: “*Kalau pemimpin tidak ikhlas, banyaklah niat yang ‘kan terkandas*”. Artinya, keikhlasan seorang pemimpin dalam bertindak akan sangat mempengaruhi *output* dari proses pelaksanaan niat tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak ikhlas, maka niat-niat baik yang ada tentunya akan hilang.

J. Sebagai pemimpin banyak taatnya

Taat dan takwa kepada Allah

Taat kepada janji dan sumpah

Taat memegang petua amanah

Taat memegang suruh dan teguh

Taat kepada putusan musyawarah
Taat memelihara tuah dan meruah
Taat membela negeri dan rakyatnya

Ketaatan bukan hanya sebagai kewajiban yang dimiliki oleh rakyat terhadap pemimpinnya, melainkan juga dimiliki oleh seorang pemimpin itu sendiri. Budaya politik Melayu menekankan pentingnya hubungan timbal balik yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Rakyat wajib menaati pemimpin, begitu pula sebaliknya. Raja harus menaati suara rakyat. Ia tak boleh mengabaikan aspirasi warganya, terlebih apabila suara itu adalah keputusan musyawarah. Ia harus taat pada kewajibannya untuk membela negara dan rakyatnya. Selain itu, yang paling penting juga adalah bahwa ia harus taat pada Allah, karena bagaimanapun ia adalah perwakilan Allah di muka bumi.

K. Sebagai pemimpin mulia duduknya

Duduk mufakat menjunjung adat
Duduk bersama berlapang dada
Duduk berkawan tak tenggang rasa

Sikap dan sifat yang baik harus menjadi identitas seorang pemimpin. Kelakuan sehari-hari sang pemimpin mampu mencerminkan kepribadian yang baik. Inilah yang dimaksud dengan syair di atas, bahwa seorang raja harus memiliki tingkah laku yang baik sehingga tidak kehilangan kewibawaannya. Ia harus bersama-sama rakyat untuk menjunjung adat tanpa adanya perbedaan kewajiban. Kedudukannya sebagai pemimpin tak mengurangi sedikit pun untuk selalu menjunjung adatnya. Ia juga harus sering duduk bersama rakyatnya, dengan segala kebesaran hatinya mau menghilangkan kesombongan dan bersedia mendengarkan keluh kesah rakyatnya, sehingga akhirnya mampu bertenggang rasa. Kewibawaan akhirnya menjadi penilaian apakah ia seorang pemimpin yang baik atau buruk.

L. Sebagai pemimpin banyak sadarnya

Memimpin sadar yang ia pimpin

Mengajar sadar yang ia ajar

Memerintah sadar yang ia perintah

Menyuruh sadar yang ia suruh

Berdasarkan fenomena di banyak negara dan kerajaan, seorang pemimpin kerap menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan di sini tak hanya merujuk pada perbuatan yang menjurus pada pelampiasan ambisi pribadi, melainkan kesalahan dalam mengambil keputusan yang akhirnya menyusahkan rakyatnya. Banyak pemimpin yang tak mampu membaca situasi dan tak mengerti keadaan yang pasti, akhirnya terjerumus dalam persoalan yang lebih parah. Maka dari itu, seorang pemimpin harus benar-benar sadar apa yang ia lakukan, sadar tentang alasan dalam melakukannya, dan yang paling penting adalah sadar akan akibatnya.

Mungkin metode Socrates perlu diterapkan dalam hal ini. Ia pernah mengemukakan tiga kriteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan. Pertanyaan pertama: apakah sebuah tindakan adalah benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, maka menyusul pertanyaan kedua: apakah tindakan yang benar tersebut perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, maka pertanyaan ketiga adalah: apakah hal tersebut baik atau tidak untuk dilaksanakan? Metode tersebut sangatlah cocok untuk digunakan dalam melatih kesadaran seorang pemimpin dalam bertindak.

M. Sebagai pemimpin banyak tidaknya

Merendah tidak membuang meruah

Meninggi tidak membuang budi

Sayang tidak akan membinasakan

Kasih tidak merusakkan

Baik tidak mencelakakan

Elok tidak membutakan

Buruk tidak memuakkan

Jauh tidak melupakan
Dekat tidak bersinggungan
Petua tidak menyesatkan
Amanah tidak mengelirukan

Hak, tentunya, selalu disandingkan dengan kewajiban. Begitu pula halnya dengan sifat kepemimpinan. Berbagai pantangan harus dihindari demi sempurnanya pelaksanaan suatu kewajiban. Seorang pemimpin haruslah selalu memegang teguh kebaikan dan menghindari keburukan yang dapat merugikan rakyatnya. Pepatah lama mengatakan: “*Sifat elok sama dipegang, sifat buruk sama dipantang. Elok dipegang, buruk dibuang.*” Itu artinya seorang pemimpin haruslah hanya berpegang pada sifat-sifat yang baik saja dan harus membuang jauh-jauh sifat-sifat yang buruk. Raja sebagai “bayang-bayang” Tuhan di muka bumi haruslah mencerminkan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Dalam konteks Melayu yang kental dengan nuansa Islam, *Asmaul Husna* harus menjadi pegangan dalam bertindak.

Uraian di atas adalah kriteria seseorang untuk dikatakan sebagai pemimpin ideal. Raja-raja Melayu banyak mencerminkan sifat-sifat tersebut. Namun, apabila melihat kondisi kekinian, para pemimpin negeri ini justru memperlihatkan sifat-sifat yang sebaliknya. Pantas saja bila akhirnya bangsa ini terburuk. Kondisi Indonesia kini sungguh tak mencerminkan kebesarannya sebagai sebuah bangsa yang besar.

Tampaknya, diperlukan sebuah pembelajaran politik bagi para politikus saat ini. Terlebih lagi, Pemilihan Umum 2009 sudah ada di depan mata. Khazanah politik Melayu seperti yang dipaparkan di atas dapat dijadikan rujukan untuk menanamkan nilai etika, kemudian mematrinya kuat-kuat dalam setiap hati dan pikiran individu-individu pelaku politik. Alangkah baiknya apabila sebelum terjun dalam proses demokrasi tersebut, para pemimpin dan calon pemimpin membaca, mempelajari, dan berusaha untuk mengamalkan khazanah etika politik Melayu.

Di sisi lain, pendidikan tentang budaya bangsa mesti harus terus digalakkan. Pendidikan mengenai etika politik yang bersumber pada budaya luhur bangsa cukup relevan untuk mengatasi hancurnya etika politik. Penggalan lebih dalam khazanah-khazanah Melayu patut dikembangkan mengingat begitu banyaknya kekayaan kultural yang terpendam. Tradisi sastra juga mesti mendapatkan tempat yang layak

dalam pendidikan formal mengingat begitu banyak pelajaran yang diambil dari sana. Selama ini, sastra menjadi objek studi yang selalu kalah pamor dibandingkan Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, dan sejenisnya. Sudah saatnya, bangsa ini belajar kembali dari sejarahnya dan menghargai warisan sastra.

Taj-us Salatin, Salatus Salatin, Bustanul Salatin, Hikayat Hang Tuah, dan hikayat-hikayat lainnya terbukti memiliki kandungan nilai-nilai yang luhur. Sayangnya, karya-karya besar tersebut seringkali tersisihkan oleh karya-karya bangsa asing, sebut saja karya *Il Principe* dari Machiavelli. Akibatnya, para politikus bangsa ini lebih banyak berkiblat pada budaya dan pemikiran luar. Ironis, bukannya sifat-sifat raja seperti yang diajarkan dalam *Taj-us Salatin* yang berkembang, melainkan sifat Machiavelian yang justru tumbuh subur.

V. PENUTUP

Moralitas harus dijunjung tinggi oleh penguasa yang memimpin. Banyaknya kebobrokan politik dan ekonomi di Indonesia disebabkan karena rendahnya moralitas yang dimiliki pemimpin; dalam kancah perpolitikan, etika dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari sudah tidak ada. Alhasil, banyak kerugian yang dialami oleh berbagai pihak; sedangkan keuntungan yang sifatnya sementara hanya dialami oleh sebagian kecil saja. Banyak pemimpin yang berkuasa tetapi sesungguhnya tidak memimpin. Sebab, memimpin berarti memberikan arah politik dan ekonomi yang jelas.

Khazanah Melayu sangat kaya dengan kandungan pesan moral dan etika, termasuk etika politik. Sifat-sifat kepemimpinan yang ideal telah banyak dijabarkan dalam karya-karya sastra Melayu. Maka dari itu, sangatlah tepat apabila kita mencoba untuk menggali, mempelajari, dan berusaha mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia kini membutuhkan sosok pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Khazanah politik Melayu banyak menawarkan konsep kepemimpinan yang ideal tersebut.

Pemimpin dalam konsep Melayu bukanlah berada di belakang sehingga ia ditinggalkan, tetapi di tengah-tengah rakyatnya. Pemimpin adalah seseorang yang mampu berkata: "*Kalau aku ini adil sembahlah aku, kalau aku lalim sanggahlah aku*".

Indonesia juga membutuhkan figur Raja Ali Haji yang dikenal mampu membangkitkan motivasi masyarakat dan umat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan semangat kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang menghasilkan sikap pesimis bagi rakyatnya.

Angka korupsi yang tinggi, kekerasan dalam pemilihan kepala daerah, pro-kontra seputar anti-pornografi dan pornoaksi, DPR yang tidak kritis, DPD yang mandul, pemerintah yang tuli dan buta terhadap penderitaan rakyat, memberi sinyal kuat bahwa politik Indonesia kita bermasalah, penuh kotoran, sampah, limbah, dan virus. Sejumlah patologi politik seperti ini memerlukan pembacaan kembali perihal visi politik, atau setidaknya revitalisasi sebagai cara untuk membongkar di mana sebetulnya kelemahan visi politik kita selama ini. Khazanah Melayu dapat menjadi

metode sekaligus referensi untuk menyelesaikan kemelut dan berbagai permasalahan Indonesia saat ini.

Konsekuensi jika seseorang, terlepas dari statusnya, melupakan norma-norma yang diajarkan dan diwariskan berdasarkan iman kepada Allah Swt. Lingkup kearifan itu bukan hanya lokal tapi sudah menjangkau rentang suatu negeri. Dalam konteks sekarang, jangkauannya meliputi suatu Negara. Semoga para pemimpin kita tidak lupa diri atau lupa pada kultur (kearifan) lokal.

Masyarakat Melayu begitu menghargai dan menjunjung tinggi budi. Mereka menilai segala sesuatu itu berdasarkan pada budi. Buktinya, kecantikan seseorang bukan dinilai pada paras rupanya tetapi dinilai pada budi bahasanya.

DAFTAR PUSTAKA

Braginsky. 1998. *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19*. Jakarta: INIS.

Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Genta Press.

Haji, Raja Ali. 1887. *Muqaddima fi Intizham*. Daik Lingga.

_____. 1886. *Tsamarat al-Muhimmah*. Daik Lingga.

Junus, Hasan. 2002. *Raja Haji Fisabilillah Hannibal dari Riau*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.

_____. 2004. *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji sebagai Bapak Bahasa Indonesia*. Pekanbaru: UNRI Press.

Koentjaraningrat et.al. 2006. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

LAN, Pusklat Spimnas (2010). *Bahan Ajar Diklat Tata Pemerintahan*. Jakarta.

Mahdini. 2000. *Etika Politik: Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat al-Muhimmah*. Riau: Yayasan Pusaka Riau.

Machiavelli, Niccolo. 1987. *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Mitchell, Joyce, dan William C. Mitchell. 1969. *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science*. Chicago: Rand and Mc. Nally.

Mutalib, Hussin. 1996. *Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu*. Jakarta.

Nasution, Bismar. 2003. "Peranan Birokrasi dalam Prinsi-prinsip Good Governance",

Rab, Tabrani. 1990. *Fenomena Melayu. Lembaga Studi Sosial Budaya Riau*. Pekanbaru.

Tenas Effendy, (2006), *Tunjuk Ajar Melayu*, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Penerbit Adicita.

Tenas Effendi, 2002. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

_____. 2005. Sopan-Santun Melayu: Bentuk dan Realitanya dalam Dunia Global. Malaysia: Akademi Pengajian Melayu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



H. Muhammad Fadhli, S.Sos, M.Si bin Bachrumsyah, dengan panggilan hari-hari **IJK**, lahir di Bengkalis pada tanggal 07 Januari 1972. Menikah tanggal 8 Agustus 1997 dengan seorang wanita yang bernama **Hj. Dian Darayanti Binti Ajbar Elwalid**, dikarunia 3 (tiga) orang cahaya mata yaitu: (1) Siti Fahma Diani, (2) Muhammad Fandi Fadhli, dan (3) Muhammad Fatahilah Fadhli . Menamatkan SD, SMP

dan SMA di Bengkalis. Menamatkan pendidikan Diploma 3 (D3) STPDN Jatinangor Jawa Barat tahun 1994, pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisipol USU) Tahun 1999 di Medan. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pernah bekerja sebagai sebagai Kasubsi Perekonomian dan Produksi kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis selama dua tahun, berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Subbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 1999-2001. Menamatkan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI) pada tahun 2005 . Memperoleh kesempatan menjabat Sekretaris Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Eselon IV/a) dari Tahun 2002 sampai dengan 2003. Tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan Desember 2007 dipromosikan menjabat Camat Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Camat Bukit Batu pada tahun 2007 – 2008 dan Camat Bengkalis tahun 2008. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis (Eselon III/a) akhir Desember Tahun 2008 sampai dengan 17 September 2010. Kemudian menjadi fungsional di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis selama satu tahun, staf pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik selama 1 tahun dan pada tanggal 8 Juni 2012 dipindahkan ke Badan Diklat dan Kepegawaian Kab. Bengkalis sebagai Widyaiswara sampai dengan sekarang.

